Edisi 2, Desember 2019

WARTA**BALITBANG**

FAKTUAL, RESPONSIF, FUTURISTIK

SDM UNGGUL, INDONESIA MAJU

Rilis Hasil PISA 2018 pada
tanggal 3 Desember 2019.

Apa itu PISA? Pindai kode berikut:

Informasi lebih lanjut,
dapat ditelusuri melalui:

litbang.kemdikbud.go.id
twitter.com/litbangdikbud
instagram.com/litbangdikbud
facebook.com/balitbangkemendikbud

Terimakasih atas dedikasi dan pengabdian

Bapak Muhadjir Effendy

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kabinet Indonesia Kerja

Selamat datang dan selamat bertugas,

Bapak Nadiem Anwar Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kabinet Indonesia Maju

RALAT

Pada Warta Balitbang Edisi 2 Tahun 2018 halaman 43 lalu, terdapat kesalahan foto pada artikel berjudul "Penelitian Peradaban Hindu Buddha Masa Kadiri Singhasari di Kediri, Jawa Timur: Temukan Struktur dan Artefak Candi Adan-Adan, Jejak-Jejak Masa Kerajaan Kediri" Foto yang benar adalah foto di samping.

Foto. Sudut barat daya Candi Adan Adan dan bagian penampil yang menjorok ke barat. (Sumber Puslit Arkenas 2018)

Foto di samping ini pernah ditampilkan dalam artikel berjudul "Penelitian Peradaban Hindu Buddha Masa Kadiri Singhasari di Kediri, Jawa Timur: Temukan Struktur dan Artefak Candi Adan-Adan, Jejak-Jejak Masa Kerajaan Kediri" merupakan foto untuk artikel berjudul "Pemukiman dan Etnisitas pada Peradaban Masa Majapahit" yang disajikan dalam edisi ini.

Foto: Temuan: lantai berbahan krakal, struktur tembok bata pembagi ruang-ruang, Situs Grogol Kawasan Trowulan. Difoto dengan menggunakan drone. (Sumber: Puslit Arkenas 2018)

Daftar isi

"Kawan-kawan pemuda, satu-satunya kegagalan adalah kalau kita hanya diam di tempat. Dan satu-satunya kesuksesan adalah kalau kita terus melangkah ke depan. Kita mungkin tersandung-sandung, kita mungkin jatuh, tapi kita tidak akan tiba di tujuan hati kita kalau kita tidak melangkah bersama"

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat Peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2019

02 Dari Redaksi

03 Potret AKSI 2019: Simulasi, Survei Utama, dan Pengolahan Data

05 Mencintai Pekerjaan sebagai Bagian dari Pengabdian

08 Meningkatkan Kualitas, Peneliti Arkeologi Mengikuti Konferensi SEAMEO SPAFA 2019 di Bangkok

11 Potensi Kekayaan Warisan Budaya Bendawi Nusa Tenggara Timur

14 Diagnosis Hasil UN untuk Perbaikan Mutu Pendidikan

16 Pembelajaran dari Proses Lahirnya Kebijakan

20 Budaya Komuter Laut Masyarakat Kota Ternate

23 Berebut Pilihan Ke Sekolah Favorit: Favorit Untuk Siapa?

25 BSNP Siapkan Draf Akhir Standar Isi
28 Algoritma Masa Lalu dan Intranet Pesantren
31 Kolaborasi Berbuah Karya dan Prestasi

33 Perlunya Kebijakan Baru Berkenaan dengan Gerakan Literasi Sekolah

35 Mendikbud: Kualitas Pembelajaran terus Ditingkatkan

36 Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Penanaman Nilai Pancasila Sejak Dini

37 Pentingnya Kemampuan Literasi

39 Sinergi Tripusat Pendidikan untuk Penguatan Karakter

41 Potret Akreditasi Sekolah dan Madrasah Tahun 2018

44 Menyiapkan Keahlian Inovatif yang Inklusif pada Era Digital

47 Mempersiapkan Guru Abad 21

49 Pemukiman dan Keanekaragaman Etnik Pada Peradaban Masa Majapahit

51 Pendidikan Non Formal: Ujung Tombak Pemberantasan Buta Aksara di Daerah 3T

53 Takdir yang Tidak Ditentukan oleh Sejarah
55 Kasmaran Berilmu Pengetahuan

56 Alcob Internet Volunteer (AIV) Workshop 2019

57 Seminar On Pisa: Assessing 21St Century Life Skills

Dari Redaksi

"Jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menggunakan cara-cara baru, maka bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Indonesia butuh SDM yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat, serta menguasai keterampilan dan ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan. Pendidikan harus berakar pada budaya bangsa, memperjuangkan kepentingan nasional, dan tanggap terhadap perubahan dunia. Keluarga dan lembaga pendidikan menempati peran sentral dalam pendidikan ", Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang, Kemendikbud), menerbitkan Warta Balitbang (WB) sebagai salah satu wujud dukungan dalam menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan.

Pada WB edisi kedua di tahun 2019 ini, sejalan dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, WB mengusung tema **"SDM Unggul, Indonesia Maju"**. Redaksi memuat artikel-artikel terkait pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, seperti Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), peningkatan kualitas penelitian arkeologi, mengungkap potensi kekayaan warisan budaya bendawi dari NTT, diagnosis hasil ujian nasional untuk perbaikan mutu pendidikan, dan sebagainya. Pada edisi kali ini juga, kami mengajak mitra kami, seperti guru, kepala sekolah, dan lembaga penelitian lainnya, untuk turut berkontribusi artikel yang dimuat di dalam WB kali ini, seperti artikel terkait algoritma dan guru abad 21.

Untuk menambah referensi pembaca kami menghadirkan resensi buku Prisoners of Geography: Ten Maps That Tell You Everything You Need to Know About Global Politics dan Kasmaran Berilmu Pengetahuan.

Semoga WB ini dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi pembaca semua.

Salam,
Redaksi

DEWAN REDAKSI

Pembina
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Pengarah
1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
2. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
4. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan
5. Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

Penanggung jawab
Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama

Pimpinan Redaksi/Anggota
Kepala Subbagian Kerja Sama dan Publikasi

Redaktur
1. Diyan Nur Rakhmah
2. Zulfikri Anas
3. Eviana Hikamudin
4. Harriyadi
5. Nurul Najmah
6. Subhan Dika Putra
7. Dinan Hasbudin Apip
8. Amaliah Fitriah

Penyunting
1. Genardi Atmadiredja
2. Leli Alhapip
3. Nur Hasan
4. Libra Hari Inagurasi

Desain Grafis
Fahmi

Fotografer
Heru Setyono
Ibar Warsita

Sekretariat
Joko Muhyono
Wina Handayani
Erwin

Potret AKSI 2019: Simulasi, Survei Utama, dan Pengolahan Data

Abdul Rahman

Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) merupakan salah satu program yang dirancang oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Balitbang Kemendikbud, untuk memantau mutu pendidikan secara nasional pada satuan pendidikan guna mendapatkan informasi data yang valid tentang mutu pendidikan yang menggambarkan pencapaian kemampuan siswa yang dilakukan melalui survei yang bersifat longitudinal.

Survei Utama AKSI diikuti oleh siswa sampel kelas IV, VIII, dan X dan difokuskan pada literasi membaca, matematika, dan sains, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tiga literasi tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain: latar belakang (siswa, guru, sekolah) dan proses belajar mengajar di sekolah.

Survei Utama AKSI Kelas VIII tahun 2019 melibatkan 90.951 orang siswa sampel yang dipilih menggunakan teknik *Multi Stages Probability Sampling*. Siswa terpilih berasal dari 1.925 sekolah yang tersebar di 406 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Moda pelaksanaan AKSI 2019 adalah ujian berbasis komputer. Jadwal pelaksanaan survei utama adalah pada rentang 23 Juli 2019 sampai 8 Agustus 2019 yang terbagi dalam 3 tahap. Alokasi waktu yang disediakan untuk peserta mengerjakan tes adalah selama 120 menit dan pengisian kuesioner 30 menit. Puspendik mengadakan pelatihan teknis petugas AKSI yang terdiri dari perwakilan dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota pada rentang tanggal 25 Juni sampai 7 Juli 2019 di 34 provinsi. Pelatihan teknis tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai AKSI serta tujuan dan fungsi

Sumber Foto : Balitbang Kemendikbud

Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) merupakan salah satu program yang dirancang oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud, untuk memantau mutu pendidikan secara nasional pada satuan pendidikan guna mendapatkan informasi data yang valid tentang mutu pendidikan yang menggambarkan pencapaian kemampuan siswa yang dilakukan melalui survei yang bersifat longitudinal.

AKSI dalam rangkaian penilaian pendidikan. Selain itu, para petugas diharapkan mampu memahami dan menyampaikan informasi tentang AKSI kepada sekolah-sekolah yang menjadi sampel.

Secara umum pelaksanaan Survei Utama AKSI berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana, dan tidak ada kendala yang cukup berarti. Hal ini terbukti dari tingkat partisipasi peserta yang mencapai 95% dari total seluruh target sampel berikut data respon dan angket yang diunggah ke laman situs pendataan. Meskipun pada saat pelaksanaan Survei Utama AKSI masih terdapat beberapa kendala minor, namun dapat diatasi dengan baik oleh proktor sekolah dengan berkoordinasi dengan petugas AKSI kota/ kabupaten dan juga petugas pusat.

Setelah pelaksanaan Survei Utama dan seluruh data respon diterima, Puspendik kemudian melaksanakan Pengolahan Data Survei Utama AKSI 2019. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan skoring respon jawaban siswa sampel. Untuk beberapa jenis soal, dapat diskor otomatis menggunakan aplikasi skoring. Sedangkan respon siswa sampel untuk soal jenis isian dan uraian yang tidak dapat diperoleh melalui metode *auto scoring,* Pengolahan data ini melibatkan 805 orang guru mata pelajaran terkait di 7 region berbeda yaitu Bandung, Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Yogyakarta, dan Tangerang Selatan. Dengan dukungan penuh dari dinas pendidikan provinsi dan kota terpilih, kegiatan pengolahan data AKSI ini dapat berjalan dengan baik.

Puspendik berharap Survei Utama AKSI 2019 dapat memberikan informasi yang sistematis dan ilmiah untuk berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Bappenas, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, parlemen, perguruan tinggi, kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat luas. Sehingga akan bermuara pada perbaikan pembelajaran dan peningkatan kompetensi siswa Indonesia dalam literasi membaca, matematika dan sains.

Sumber Foto : Balitbang Kemendikbud

Sumber Foto : Kemendikbud

Mencintai Pekerjaan sebagai Bagian dari Pengabdian

Wawancara Bapak Dadang Sudiyarto,
Sekretaris Balitbang Kemendikbud Periode Oktober 2013 - Agustus 2019

Diyan N.R.

Sekretaris Balitbang 2013-2019

Sumber Foto: Sekretariat Balitbang

Perubahan terbesar yang pernah terjadi di Balitbang, salah satunya transformasi UN dari yang berbasis kertas dan pensil menjadi UN Berbasis Komputer (UNBK)

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemendikbud) mengalami transformasi dan perubahan dalam berbagai aspek. Menjelang berakhirnya masa jabatan di bulan September 2019, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemendikbud) periode Oktober 2013 - Agustus 2019, Dadang Sudiyarto, menyampaikan berbagai hal perihal transformasi dan perubahan tersebut kepada Warta Balitbang.

Bagaimana perubahan Balitbang Kemendikbud secara umum dalam pandangan Bapak?

Perubahan positif lebih banyak terjadi pada kinerja organisasi dan sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. Di sisi kinerja organisasi, Balitbang salah satunya dapat memenuhi permintaan (untuk menyempurnakan data-data yang dimiliki *–red)* Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal tersebut adalah bagian dari bentuk pelayanan kepada kementerian dan masyarakat. Pada 2013, Balitbang melakukan perubahan dalam tahap persiapan kurikulum, yang salah satunya adalah penyelesaian terhadap penyediaan buku-buku pelajaran yang menunjang implementasi Kurikulum 2013.

Pengelolaan Ujian Nasional (UN) pun perlu dibenahi. Penyelesaian isu terkait pengelolaan UN difokuskan pada tahapan perencanaan pelaksanaan UN. Saya mengajak teman-teman berpikir sistematis dalam hal perencanaan, tahapannya termasuk terkait dengan lelang (penyediaan bahan dan kelengkapan UN *–red*)

Sumber Foto: Sekretariat Balitbang

dan berkaitan dengannya. Hingga saat ini, perubahan yang terjadi senantiasa harus terus berubah sesuai perkembangan kebijakan. Artinya, pada setiap perubahan tidak ada standar terhadap perubahan tersebut. Perubahan terbesar yang pernah terjadi di Balitbang, salah satunya transformasi UN dari yang berbasis kertas dan pensil menjadi UN Berbasis Komputer (UNBK).

Apakah berbagai perubahan yang terjadi dalam UN, misalnya, memang merupakan sebuah terobosan baru?

Benar. Perubahan dalam sistem lelang, misalnya, sebelum lelang pengadaan bahan dan kelengkapan UN, kami membuat formulasi agar mudah dalam menghitung kapasitas kebutuhan bahan UN. Jadi, dalam pemilihan pemenang lelang, tidak lagi akan menemukan penyedia yang telah dinyatakan menjadi pemenang lelang, tetapi tidak dapat mengerjakan tugas sesuai dengan yang sudah disepakati dengan alasan kapasitas. Semua lelang dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Saya ketat dan tegas terhadap hal tersebut.

Apa kesibukan Bapak menjelang masa berakhirnya jabatan di Balitbang?

Menjelang akhir tahun ini, yang menjadi prioritas Balitbang adalah sinkronisasi dan pembaruan data. Ketersediaan data dari UN, juga dapat menyempurnakan Dapodik yang telah selama 4 tahun sudah lebih dulu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Ketersediaan data dari hasil pelaksanaan UN menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di sekolah semakin membaik, lembaga sekolah dipandang sebagai lembaga yang kredibel termasuk di dalamnya penyelenggaraan UN yang tingkat kecurangannya semakin berkurang. Sinkronisasi dan pembaruan data melalui data-data yang dapat terpetakan dari hasil UN juga menjadi dasar perbaikan lain dalam hal pengelolaan pendidikan. Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga sudah makin terstruktur dan tepat sasaran.

Perbaikan internal organisasi berkisar tentang kedisiplinan pegawai serta pengelolaan administrasi dan belanja instansi. Kedisiplinan pegawai terlihat dari berkurangnya pegawai yang absen/tidak hadir dari jam kantor dan lebih berkinerja, apalagi dengan sistem pemberian tunjangan kinerja. Biaya-biaya perjalanan dinas juga menjadi salah satu fokus perubahan. Pegawai tidak hanya ke luar kota/daerah, tanpa ada hasilnya yang relevan bagi organisasi. Saya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkewajiban untuk menjaga kualitas pengeluaran yang ada di Balitbang agar baik secara administrasi dan juga pertanggungjawabannya secara substansi organisasi. Untuk pengembangan SDM sendiri, sudah banyak upaya penataan, walau belum seluruhnya, namun cukup mengurangi kesenjangan pegawai (antara kompetensi dan tugas jabatannya –*red*).

Bagaimana Bapak memandang pentingnya SDM bagi sebuah organisasi?

Sangat penting karena SDM adalah motor dari setiap organisasi. Memang masih ada kesenjangan karena perbaikan dalam setiap organisasi itu tidak bisa sekaligus baik, tapi tergantung dari pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen dalam organisasi tersebut.

Akhir-akhir ini, Bapak sering melakukan kebijakan rotasi pegawai. Strategi apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi resistensi

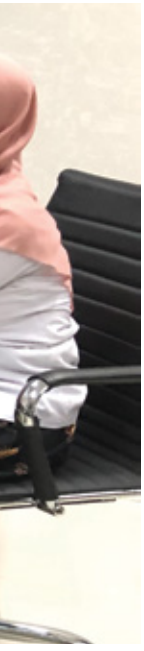

Sumber Foto: Sekretariat Balitbang

dari dampak rotasi tersebut?
Memang setiap rotasi menjadi resisten, karena beberapa orang menilai bahwa mereka 'dibuang' atau 'disingkirkan'. Tapi sebenarnya tidaklah seperti itu. Rotasi pegawai dilakukan dengan atas dasar kompetensi dan kebutuhan organisasi. Misalnya, pegawai dengan latar belakang teknologi informasi apakah benar-benar dibutuhkan di bidang yang sama sekali tidak terkait? *Kan* tidak seperti itu. Dia akan lebih bermanfaat jika berada di bidang berkenaan jaringan dan perangkat komputer, misalnya. Begitupun dengan bidang-bidang pekerjaan lain, yang seharusnya memiliki relevansi dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai. Memang saya akui, pada beberapa pegawai, pemindahan ini tidak memberikan dampak signifikan, karena sebenarnya banyak juga pegawai yang fleksibel kompetensinya, sehingga mudah dipindah-pindahkan ke beberapa bidang pekerjaan.

Termasuk pada penentuan formasi pegawai yang dibutuhkan organisasi, kami mencoba untuk lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya dari latar belakang pendidikan tertentu seperti misalnya Teknik Sipil, kami butuhkan dalam rangka memperkuat fungsi pengelolaan Barang Milik Negara, dan berkenaan dengannya. Dan beberapa contoh lain yang semata-mata didasarkan pada pemenuhan SDM yang kompeten dan berkualitas.

Menurut pandangan Bapak, apa potensi besar Balitbang?
Sumber daya yang ada di setiap Pusat (unit eselon II Balitbang –*red*). Saat ini, sudah baik. Kondisi ini tidak terlepas dari pola rekrutmen CPNS yang dijalankan, yang menghasilkan banyak pegawai muda yang potensial. Namun di Sekretariat, regenerasi pegawainya agak lambat selepas tidak adanya jatah formasi untuk penempatan di Sekretariat.

Bagaimana dengan budaya kerja, apakah ada potensi yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan Balitbang?
Kalau di Sekretariat memang sudah terbentuk budaya kerjanya. Untuk Pusat-Pusat yang tugas dan fungsinya memang penelitian, diharapkan dapat benar-benar fokus pada bidang penelitian dan pengembangan. Apalagi ditunjang dengan SDM yang juga berkualitas, regulasi dan anggaran yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Pusat-Pusat dalam melakukan penelitian dan pengembangan.

Apa kesan terbaik Bapak selama di Balitbang?
Tim Balitbang dapat diajak bekerja sama. Kerja sama di sini saya artikan bahwa walaupun mereka (Tim Balitbang –*red*) memiliki kecepatan dan keseiramaan bekerja yang berbeda beda pada setiap orang, tetapi memiliki persamaan untuk senantiasa bekerja sama memperbaiki organisasi.

Apa tantangan paling berat yang Bapak hadapi selama mengabdi di Balitbang?
Tantangan untuk dapat selalu bekerja dengan pegawai yang memiliki passion bekerja yang sama, yaitu memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan. Jadi, tidak perlu menunggu dikomandoi, dapat tergerak untuk bekerja. Kondisi ini sebenarnya banyak terjadi bukan karena cocok atau tidaknya latar belakang seseorang dengan pekerjaan yang diberikan padanya, namun lebih pada seberapa besar kecintaannya pada pekerjaan.

Mereka yang bekerja di Balitbang adalah orang-orang yang mengambil banyak peran dari 'belakang layar'. Hasil kerja Balitbang banyak digunakan oleh orang lain dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan. Hal ini yang seharusnya juga menjadi bagian dari kebanggaan kita sebagai bagian dari Balitbang. Oleh karenanya, sebagai pegawai dan setiap pegawai, perlu untuk benar-benar dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas diri dalam bidangnya masing-masing. Salah satu cara mempermudahnya adalah, ya berusaha mencintai pekerjaan yang dimilikinya.

Apa pesan Bapak bagi para pegawai yang masih berkarya di Balitbang.
Cintai pekerjaan, dengan apapun bentuk dan kontribusi kita kepada institusi ini (Kemendikbud –*red*). Karena dengan mencintai pekerjaan, kita akan merasakan kenyamanan dalam bekerja, di manapun dan dengan siapapun.

Meningkatkan Kualitas, Peneliti Arkeologi Mengikuti Konferensi SEAMEO SPAFA 2019 di Bangkok

Sukawati Susetyo

Sejumlah peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) dan Balai Arkeologi (Balar) mengikuti konferensi *Internasional Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Archaeology and Fine Arts* (SEAMEO SPAFA) ke-3, tentang Arkeologi Asia Tenggara. Konferensi berlangsung di Sukhumfit 31 Hotel Bangkok, Thailand, pada tanggal 17 sampai 21 Juni 2019. Peserta dari Indonesia terdiri atas peneliti Puslit Arkenas (3 orang peneliti), Balar Jawa Barat (1 orang peneliti), Balar Yogyakarta (3 orang peneliti), Balar Kalimantan Selatan (1 orang peneliti), Balar Sulawesi Utara (1 orang peneliti). Selain peneliti arkeologi, juga hadir beberapa dosen dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Udayana (Unud). Kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan untuk memajukan arkeologi di Asia Tenggara, dan juga untuk memberikan kesempatan bagi para arkeolog untuk berdiskusi, berbagi informai, dan menyebarluaskan hasil penelitian tentang arkeologi Asia Tenggara terkini.

Konferensi SEAMEO SPAFA 2019 dihadiri lebih dari 300 peserta dari 27 negara, persidangan dilaksanakan secara pleno dan komisi. Pada hari pertama dilakukan sidang pleno dihadiri oleh semua peserta, diawali dengan *country report* hasil penelitian arkeologi terkini dari Thailand, Singapore, Myanmar, Malaysia, Laos, dan Indonesia. *Country report* hasil penelitian arkeologi Indonesia diwakili oleh Prof. Dr. I Wayan Ardika yang memaparkan hasil penelitian terkini *(selected*) dari Puslit Arkenas, Balai Arkeologi, dan Universitas-universitas di Indonesia. Adapun sidang komisi meliputi 21 sesi yang membahas berbagai masalah kearkeologian dan seni seperti: Arkeologi Musik, Rock Art, Epigrafi, Etnoarkeologi, Arkeologi Kolonial, Seni Buddha India dan Asia tenggara, Arkeologi Maritim, Manajemen Arkeologi dan lain-lain.

Para peneliti dari Puslit Arkenas dan Balai Arkeologi mempresentasikan makalah-makalah hasil penelitian di Indonesia. Tema tentang Seni Buddha India dan Asia Tenggara dipilih oleh Ashar Murdihastomo dan Sukawati Susetyo (Puslit Arkenas), dengan judul "Perbedaan dalam Kesatuan: Dua Jenis Ornamen pada candi-candi perwara, Candi Sewu", "Biaro-Biaro Berlatar Agama Buddha di Padang Lawas Tanpa Temuan Arca Buddha dalam Bentuk Besar". Tema tentang "Rock Art di Asia Tenggara" dipilih oleh Ipak Fahriani (Balar Sulawesi Utara) yang membahas tentang variasi ornamen pada waruga di Minahasa Utara; dan Tri Wuryani (Puslit Arkenas) "Hubungan Wajah Manusia dalam Rock Art Megalitik Pasemah, Sumatera Selatan".

Delegasi dari Indonesia pada SPAFACON 2019, di Bangkok, Thailand.

Sumber Foto : Sukawati Susetyo

Kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan untuk memajukan arkeologi di Asia Tenggara, dan juga untuk memberikan kesempatan bagi para arkeolog untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menyebarluaskan hasil penelitian tentang arkeologi Asia Tenggara terkini.

Seluruh peserta Konferensi SPAFA 2019 pada acara *Opening Ceremony*.

Sumber Foto : SPAFACON 2019.

Tema tentang "Interaksi Manusia Dengan Lingkungannya di Perairan Asia Tenggara" dipilih oleh: Hartatik (Balar Kalimantan Selatan), Alifah, Putri Taniardi, Agni Mochtar (Balar Yogyakarta), dan Shinatria Adityatama (Puslit Arkenas). Pada tema tersebut mereka menyajikan makalah membahas: "temuan baru situs peleburan bijih besi di tepi Sungai Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, "Eksploitasi Sumber Daya Laut di Pulau Kangean, Pantai Utara Jawa", "Tradisi *Ngen* di Ata Krowe, Sikka, Nusa Tenggara Timur, Sebagai Bukti Migrasi di Antara Komunitas Krowe", "Tradisi *Lashed-Lug* dalam Pembuatan Kapal Asia Tenggara", dan "Zaman Besi Sulawesi di Situs Bawah Air Danau Matano".

"Sesi Khusus Arkeologi Indonesia" membahas tentang temuan-temuan arkeologi terbaru di Indonesia yang dipilih oleh Rusyanti (Balar Jawa Barat) dan Hery Priswanto tentang pemukiman kuno di Patahan Liwa, Lampung Barat, Sumatra dan peran Pulau Bawean pada poros maritim Nusantara.

Setelah tiga hari konferensi dengan presentasi makalah, selanjutnya dilakukan ekskursi atau kunjungan situs ke Situs *"Pratu Khao Fort (Ancient Canals)"* di Ayuthaya, Bangkok, Thailand. Untuk meningkatkan kemampuan menulis ilmiah dan pengetahuan mengenai konservasi, sesudah ekskursi diadakan lokakarya dan pelatihan tentang penulisan ilmiah dan konservasi arkeologi.

Peserta SPAFACON mengikuti ekskursi/ kunjungan ke *"Situs Pratu Khao Fort (Ancient Canals)"* di Ayuthaya, Bangkok, Thailand.

Sumber Foto : SPAFACON 2019.

Untuk meningkatkan kemampuan menulis ilmiah dan pengetahuan mengenai konservasi, sesudah ekskursi diadakan lokakarya dan pelatihan tentang penulisan ilmiah dan konservasi arkeologi

Potensi Kekayaan Warisan Budaya Bendawi Nusa Tenggara Timur

Harriyadi

Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal dengan sebutan Flobamorata yang merupakan singkatan dari lima pulau besar yaitu Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai potensi kekayaan warisan budaya bendawi di setiap pulaunya yang menarik perhatian para peneliti khususnya dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional untuk melakukan eksplorasi dan penelitian. Melalui penelitian arkeologi yang telah sejak 1970an hingga sekarang diperoleh beragam informasi penting yang menggambarkan identitas, karakter, dan keunikan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Hasil – hasil penelitian tersebut kemudian mendorong Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melalui Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian untuk mensosialisasikan sekaligus memasyarakatkan hasil penelitian dalam kegiatan pameran.

Sumber Foto: Penulis/Puslitarkenas

Pameran dengan tema *"Pameran Sejarah, Seni, dan Budaya: Masa Lampau dan Masa Kini"* kemudian diselenggarakan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat akan budayanya sendiri. Kegiatan pameran tersebut terselenggara atas kerjasama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Museum Basoeki Abdullah Jakarta, dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Kegiatan pameran yang dilaksanakan di Museum Negeri Kupang dibuka pada tanggal 27 Agustus dan ditutup pada tanggal 2 September 2019 mampu menarik sebanyak 1.261 kunjungan. Sebagian besar pengunjung merupakan siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama, siswa sekolah menengah akhir, guru, mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional memamerkan beberapa benda hasil penelitian yang ditemukan di NTT yaitu beberapa alat batu dari Pulau Sabu, manik – manik dari Situs Nuat Bkau, replika rahang *Stegodon Sumbaensis*, dan tiruan rangka manusia *Homo Floresiensis*. Bahan pameran lain yang ditampilkan adalah buku – buku arkeologi untuk anak dan beberapa *puzzle* yang bergambar tinggalan arkeologi. Bahan – bahan pameran yang dibawa tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat khususnya pelajar untuk belajar mengenai tinggalan arkeologi. Materi pameran yang disajikan oleh Pusat Penelitian Arkeologi

Nasional mencakup penelitian awal hingga penelitian terbaru yang pernah dilakukan oleh beberapa instansi di Nusa Tenggara Timur. Materi awal yang disajikan adalah sejarah penelusuran tinggalan arkeologi di NTT yang pertama kali dilakukan oleh Th. Verhoeven, seorang missionaris berkebangsaan Belanda menetap di Mataloko. pada tahun 1960an Verhoeven melaporakan bahwa ada temuan di sekitar Situs Matamenge, Boa Lesa dan Lembahmenge berupa beberapa artefak batu dan fosil-fosil tulang hewan gajah purba *(Stegodon)* yang diduga mempunyai pertanggalan sekitar 750.000 tahun lalu. Materi kemudian disambung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (P3G) Bandung bekerjasama dengan pemerintah Belanda pada sekitar tahun 1990-an. Penelitian kemudian dilanjukan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Pusat Survei Geologi dengan Universitas Wollongong, Australia. Informasi hasil analisis terbaru yang dilakukan oleh para peneliti dari berbagai instansi juga disajikan dalam pameran. Informasi tersebut berupa penelitian yang dilakukan di Situs Wolosege, Kawasan Cekungan Soa menunjukkan alat – alat batunya berusia 1,02 juta tahu lalu. Berbagai temuan lain yang ditemukan berupa fragmen fosil-fosil tulang buaya *(Crocodillus)*, kura-kura raksasa *(Geo-chelonidae)*, tikus raksasa dan burung-burung purba. Ekskavasi di Situs Matamenge pada 2014 yang dilakukan oleh PSG Bandung mengungkap temuan penting berupa fragmen fosil gigi dan rahang/geraham serta sebuah tulang lengan *(Ulna)* dari manusia purba yang diprediksi berumur lebih dari 400.000 tahun lalu. Informasi terbaru yang menjadi materi pameran adalah jejak kehidupan manusia yang ditemukan di Situs Nuat Bkau, Flores. Dalam bahasa setempat *"Nuat"* berarti Gua dan *"Bkau"* berarti kelelawar. Gua ini memiliki temuan penting yang menunjukkan adanya manusia kehidupan pada masa Prasejarah. Temuan berupa tujuh individu rangka manusia beserta bekal kubur berupa manik – manik dan alat batu menggambarkan adanya dugaan stratifikasi sosial yang sudah ada sejak masa lau. Temuan yang cukup unik dari situs ini adalah temuan berupa dua rangka individu manusia dalam posisi berpelukan yang diduga seorang ibu dan anaknya. Berdasarkan ciri dan karakter temuan, Situs Nuat Bkau diperkirakan telah dihuni oleh manusia sejak masa Neolitik atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Temuan utama yang dipamerkan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional adalah temuan manusia kerdil *Homo Floresiensis* yang ditemukan tahun 2003 di Situs Liang Bua.

Rangka *Homo Floresiensis* menjadi *masterpiece* temuan arkeologi dari Nusa Tenggara Timur, rangkanya menjadi bahan perdebatan ilmuan dalam skala internasional. Beberapa ilmuah berpendapat bahwa *Homo Floresiensis* merupakan bagian dari *Homo Erectus* yang kerdil, sebagian berpendapat bagian dari *Homo Sapiens* yang mengalami pengecilan otak *(microchepaly)*, dan sebagian juga setuju meletakkannya sebagai spesies tersendiri. Hasil analisis terbaru dari ahli menunjukkan bahwa kondisi otak *Homo Floresiensis* normal, tidak ada indikasi menderita pengecilan otak. Lebih lanjut, *Homo Floresiensis* ini memiliki ciri yang hampur sama dengan Austalopithecus dari Afrika. Keunikannya lain yang ada pada *Homo Floresiensis* adalah tinggi badannya yang hanya mencapai 106 cm dan hidup pada rentang waktu 100.000 - 60.000 tahun yang lalu. Punahnya *Homo Floresiensis* di Liang Bua bersamaan dengan punahnya beberapa jenis binatang diantaranya: gajah purba kerdil *(stegodon florensis insularis)*, burung bangau raksasa *(giant marabou stork)*, dan burung heriang *(vulture)*.

Kekayaan tinggalan arkeologi berupa hunian manusia tidak terbatas di Flores. Eksplorasi dan penelitian di Pulau Sumba juga disajika dalam pameran ini. Materi mencakup penelitian pertama oleh Van Heekeren pada tahun 1956 yang menungkap keberadaan temuan kubur tempayan dan kubur peti batu. Penelitian tersebut kemudian dilanjutkan secara bertahap oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional hingga kini. Temuan – temuannya mengindikasikan bahwa Situs Lambanapu merupakan situs kubur masa Prasejarah yang mulai berkembang pada awal abad Masehi dengan ciri khas tinggalan artefaknya berasal dari masa Perundagian atau Paleometalik. Budaya kubur tersebut berkembang hingga masa akhir prasejrah yang meninggalkan dua variasi berupa kubur tempayan dan penguburan disertai dengan berbagai benda bekal kubur. Narvasumber sekaligus penyusun materi pameran adalah Drs. Jatmiko, M.Hum yang juga merupakan peneliti senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional berpendapat bahwa pameran merupakan upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami dan memaknai arti penting tinggalan arkeologi sebagai identitas, karakter, dan jatidiri bangsa. Sementara itu, Para Guru yang menjadi pengunjung pameran menilai bahwa kegiatan pameran sangat bermanfaat untuk perkembangan pendidikan, anak – anak dapat mengenal dan mengetahui budaya NTT dari masa Prasejarah sampai masa Sekarang. Terselenggaranya kegiatan pameran dengan tema *"Pameran Sejarah, Seni, dan Budaya: Masa Lampau dan Masa Kini"* mendorong masyarakat untuk memahami, memaknai, dan mencintai serta turut melestarikan warisan budayanya sendiri.

Diagnosis Hasil UN untuk Perbaikan Mutu Pendidikan

Eviana Hikamudin

Ujian Nasional (UN) merupakan satu bentuk evaluasi pendidikan yang tujuannya untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs sederajat) dan menengah (SMA/MA/SMK sederajat). “Hasil UN saat ini walaupun bukan sebagai penentu kelulusan siswa dari satuan pendidikan, akan tetapi dapat dijadikan informasi penting untuk dapat memetakan mutu pendidikan secara regional maupun nasional”, demikian disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, saat menyampaikan sambutan dan pengarahan dalam pembukaan kegiatan rapat koordinasi tim teknis UNBK provinsi tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) tanggal 16 September 2019 .

Selama ini analisis hasil UN yang telah dibuat oleh Puspendik setiap tahun belum dapat dimaksimalkan pemanfaatannya oleh *stakeholders* pendidikan di daerah. Padahal informasi yang ada di dalamnya sangat kaya dan bisa dijadikan bahan penyusunan kebijakan pendidikan di daerah. Pada tahun 2019, Puspendik telah menyajikan analisis hasil UN yang lebih lengkap dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Analisis hasil UN saat ini disajikan dalam bentuk laman yang dapat diakses dengan mudah

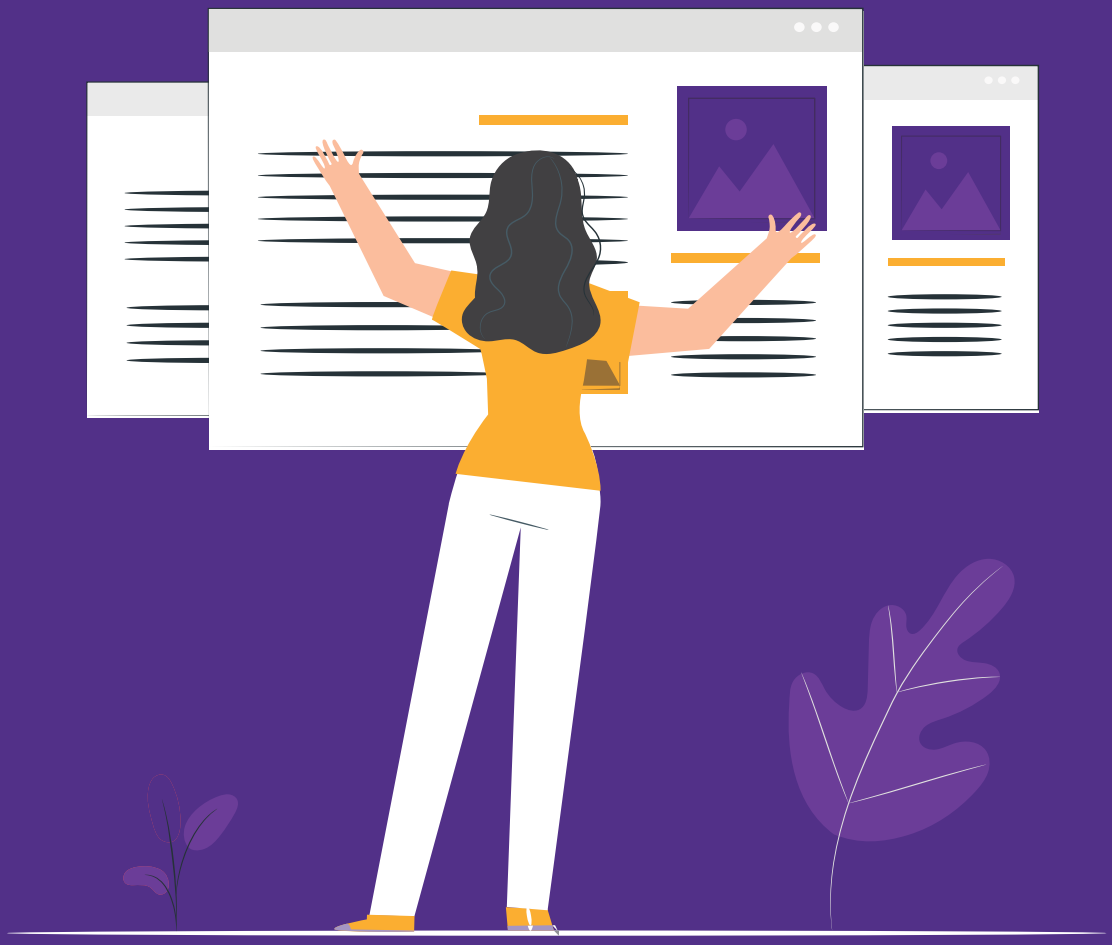

oleh semua pihak. Selain itu konten informasi yang ada di dalamnya cukup lengkap dan menarik. Bagi siapa saja yang ingin mengakses informasi analisis hasil UN dapat membuka tautan di laman https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Puspendik, Moch.Abduh, memaparkan diagnosis hasil UN kepada para kepala dinas pendidikan provinsi yang hadir. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memberikan informasi penting kepada para kepala dinas tentang capaian mutu pendidikan secara nasional dan provinsi melalui laman hasil UN yang telah dibuat oleh Puspendik. Para kepala dinas yang hadir dalam kegiatan ini nampak cukup antusias menyimak paparan diagnosis hasil UN. Hal ini memberikan sinyal positif bagi perbaikan proses pendidikan yang selama ini berjalan di setiap daerah, apalagi jika diagnosis hasil UN yang telah dibuat dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan pengambilan kebijakan di daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing. Dampak penting yang diharapkan dengan adanya diagnosis hasil UN ini adalah adanya perbaikan mutu pembelajaran di sekolah. Dari informasi yang terdapat dalam diagnosis hasil UN, dinas pendidikan dan sekolah dapat melihat kelebihan dan kekurangan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan demikian dapat disusun langkah dan strategi yang tepat untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi. Kepala sekolah dapat melalukan upaya dengan cara memberdayakan guru-guru di sekolahnya agar lebih meningkatkan kompetensi mengajarnya sekaligus mendorong para siswa untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Dengan cara seperti itu upaya perbaikan mutu pendidikan di sekolah dapat dilakukan secara terukur. Adanya peningkatan mutu di sekolah secara otomatis akan berdampak kepada peningkatan mutu di daerah. Hal inilah yang merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari disusunnya diagnosis hasil UN.

Efektifitas layanan informasi diagnosis hasil UN dapat dilihat dan diukur dari tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikannya masing-masing. Pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi hasil UN sekaligus melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya melalui dinas pendidikan. Semakin intens sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan, maka potensi perbaikan mutu pendidikan akan lebih besar. Dengan demikian efektifitas layanan informasi pendidikan melalui penyajian diagnosis hasil UN lebih mudah tercapai.

Diagnosis hasil UN merupakan informasi yang berisi:

1.
Trend capaian nilai UN selama 2 tahun terakhir baik kenaikan maupun penurunan nilai UN

2.
Disparitas Capaian Nilai UN yaitu perbandingan nilai UN antar kelompok capaian tertinggi dan kelompok capaian terendah, baik berdasarkan kelompok sekolah maupun kelompok siswa

3.
Distribusi Nilai Siswa yaitu jumlah siswa pada setiap kategori hasil UN berdasarkan rentang nilai UN selama 2 tahun terakhir.

Informasi yang disajikan tersebut dapat dipilih berdasarkan jenjang (SMP, SMA, SMK), provinsi, dan kabupaten/kota.

Tujuan Balitbang Kemendikbud membuat Diagnosis Hasil UN secara daring tersebut adalah memotivasi para pengambil kebijakan di daerah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan berbasis data yang akurat dan akuntabel. Di samping itu layanan informasi pendidikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kemendikbud dapat lebih baik sesuai dengan semangat keterbukaan informasi pendidikan kepada publik.

Pembelajaran dari Proses Lahirnya Kebijakan

Rasita Purba

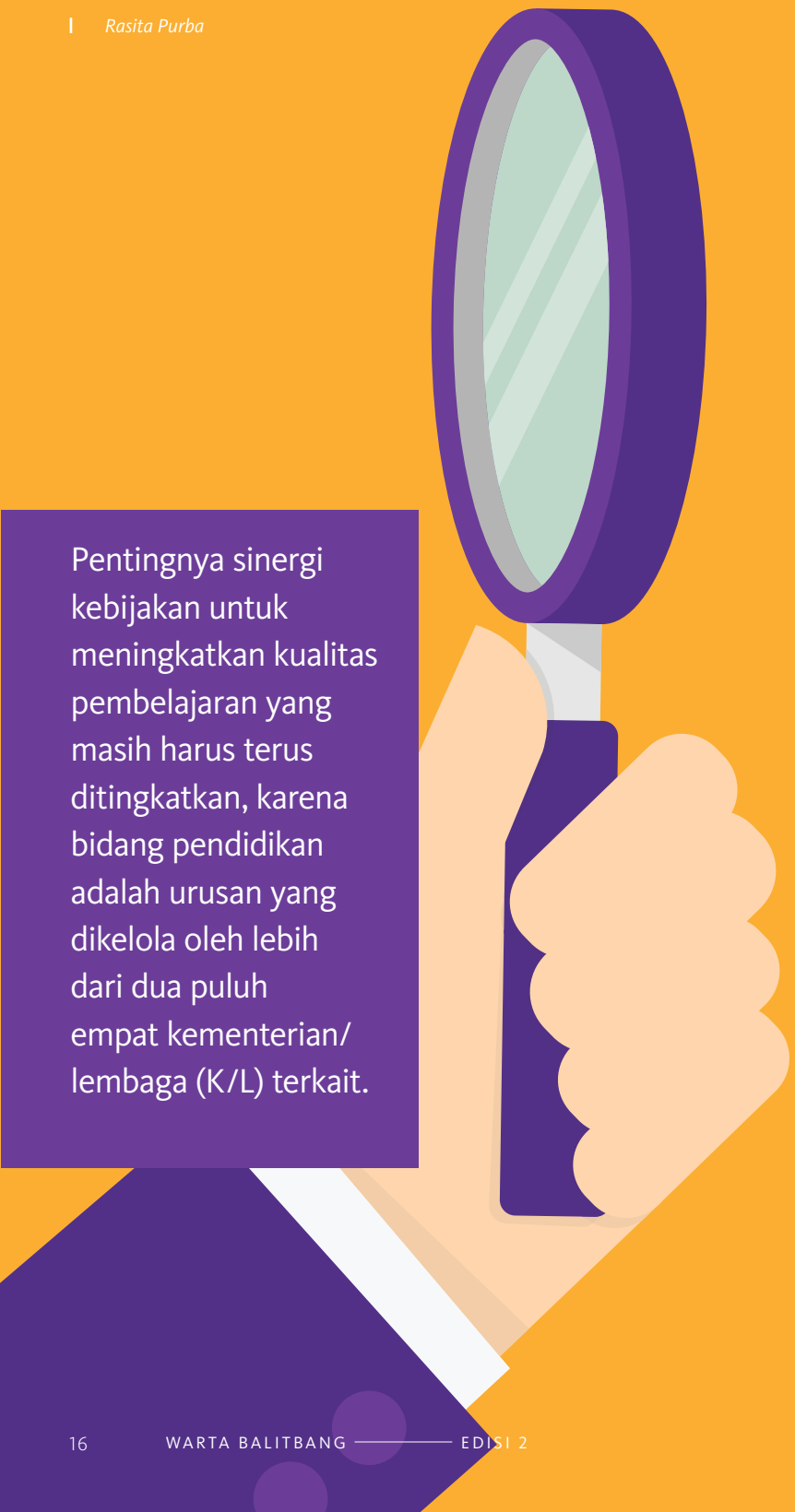

Pentingnya sinergi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang masih harus terus ditingkatkan, karena bidang pendidikan adalah urusan yang dikelola oleh lebih dari dua puluh empat kementerian/ lembaga (K/L) terkait.

Keberlanjutan merupakan hal yang perlu didorong oleh berbagai program yang pendanaanya bersumber dari lembaga donor. Keberlanjutan juga menjamin bahwa inisiatif pembangunan yang cikal bakalnya tumbuh dari berbagai program tersebut, bisa dilanjutkan atau dipertahankan oleh pemangku kepentingan terkait. *Thinking and Working Politically* (TWP) atau berpikir dan bekerja secara politis telah jamak diterapkan oleh berbagai program untuk memastikan bahwa program yang dijalankan dapat berkelanjutan, selepas berakhirnya masa program.

Salah satu aspek penting dalam implementasi TWP adalah mendorong pendekatan program agar dapat dilembagakan oleh otoritas, terkait. pelembagaan ini dapat menjadi pertimbangan agar intervensi terhadap program dapat dilanjutkan, meskipun dukungan lembaga donor sudah tidak lagi tersedia. Pelembagaan pendekatan dan program dapat dilakukan melalui penerbitan kebijakan yang relevan dan memiliki daya dukung. Perlu adanya pembelajaran yang simultan dapat melahirkan kebijakan, menjadi topik utama dalam acara Temu INOVASI (Edisi Khusus), yang diselenggarakan oleh INOVASI bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan mitra pembangunan lainnya.

Berbagai lembaga donor bekerja untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam menjalankan peran tersebut, lembaga donor dan para mitra harus memperhatikan beragam aspek

yang termasuk di dalamnya adalah memahami agenda pemerintah baik jangka panjang maupun menengah, proses pengambilan keputusan, birokrasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya pemberian dukungan kepada pemerintah perlu dilakukan dalam koridor berpikir dan bekerja secara politis.

Pembelajaran yang diperoleh dari beberapa program pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Australia melalui *Departement of Foreign Affairs and Trade* (DFAT), dari pengalaman bekerja secara politis, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menjadi tema utama diskusi di Temu INOVASI yang diselenggarakan pada 3 Juli 2019. Forum tersebut bertujuan untuk menemukan pembelajaran penting dari proses penyusunan kebijakan, melalui sudut pandang *'policy triangle'* atau segitiga kebijakan yang dikembangkan oleh Walt and Gilson. Struktur segitiga kebijakan menggambarkan empat variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan, yaitu konteks, proses, isi dari kebijakan dan aktor-aktor yang terlibat.

Forum ini menghadirkan para pembicara dari INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia), RISE *(Research on Improving Systems of Education)*, MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan), KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), TASS (*Technical Assistance for Education System Strengthening*), dan Puslitjakdikbud (Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud). Berbagai isu yang didasarkan pada pengalaman dan observasi masing-masing pihak, menjadi salah satu fokus perhatian pada setiap proses kebijakan.

Totok Suprayitno, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud menyampaikan tentang pentingnya sinergi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang masih harus terus ditingkatkan, karena bidang pendidikan adalah urusan yang dikelola oleh lebih dari dua puluh empat kementerian/lembaga (K/L) terkait. Selama ini pemerintah banyak menerbitkan aturan yang diharapkan dapat mendorong perbaikan kualitas, namun banyaknya peraturan tidak selalu menghasilkan perbaikan seperti yang diharapkan. Banyaknya peraturan dapat membuka potensi pembatasan kreativitas para pelaku pendidikan. Untuk itu beliau berharap bahwa Temu INOVASI dapat lebih banyak membahas pembelajaran dari proses pembuatan kebijakan yang benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan hasil pembelajaran.

Kebijakan literasi di Kota Batu, menjadi fokus bahasan INOVASI sebagai narasumber pertama. INOVASI dinilai bekontribusi dalam proses penyusunan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2018 yang menjadi dasar peresmian Kota Batu sebagai Kota Literasi. Pada awalnya, gerakan literasi di Kota Batu yang digagas melalui program Gerakan Literasi Nasional, belum berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Hal ini yang kemudian mendorong keinginan untuk melembagakan gerakan tersebut melalui kebijakan. Aturan ini juga dikeluarkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas literasi di sekolah, keluarga dan masyarakat. Menggunakan pendekatan *outcome harvesting* atau panen hasil (Wilson-Grau & Britt, 2012), studi ini menemukan bahwa komunikasi informal antara penggerak Gerakan Literasi Sekolah dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses perumusan kebijakan. Melalui pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*), sebuah program atau proses pembuatan kebijakan memiliki kesempatkan untuk dapat berhasil dan mudah diterima. Proses penyusunan kebijakan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Studi ini mengidentifikasi penggagas awal dari lahirnya kebijakan dan juga penyusun *draft* kebijakan serta pihak lain yang berperan sebagai konsultan. Dalam konteks ini, INOVASI menjalankan peran memberikan masukan untuk arah kebijakan dan dukungan dalam memfasilitasi proses penyusunan kebijakan.

Dimensi otoritas (*authority*) menjadi fokus kajian RISE, yang dalam paparannya menjelaskan tentang dua aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memulai proses penyusunan kebijakan, yaitu penerimaan pihak otoritas terhadap masalah (*acceptance*) and kapasitas otoritas (*ability*). Studi RISE menemukan perbandingan dari dua kabupaten mitranya. Kabupaten pertama dijalankan oleh otoritas yang menyadari dan menerima bahwa kualitas pendidikan di wilayah mereka masih rendah, namun kabupaten ini memiliki kapasitas yang terbatas untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan kabupaten kedua memiliki kapasitas lebih baik, namun mereka tidak merasa bahwa mutu pendidikan di wilayah mereka masih rendah, mengingat anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan cukup besar. Keragaman ini, menunjukkan bahwa dukungan pembangunan harus memperhatikan konteks lokal. Di kabupaten pertama, dukungan perlu difokuskan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah terkait, sedangkan di kabupaten kedua, implementasi program pembangunan harus dimulai dengan menyadarkan pemilik otoritas terhadap masalah pendidikan yang ada. Tanpa upaya penyesuaian yang bersifat kontekstual, agaknya sulit mengharapkan keberlanjutan sebuah program.

Pembangunan kontekstual juga menjadi pedoman bagi KOMPAK dalam menangani masalah anak yang tidak bersekolah di berbagai daerah.

Tanpa menawarkan solusi baru kepada pemerintah daerah, KOMPAK memilih mendukung program yang dijalankan pemerintah setempat dan menjalin kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dengan keyakinan bahwa pembangunan harus dimulai dengan apa yang tersedia di wilayah tersebut. Gerakan Kembali Bersekolah di Brebes, misalnya yang telah berhasil menyekolahkan kembali sekitar 4,000 siswa dengan mendapat dukungan dana dari APBD. KOMPAK menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal sejak awal program dilaksanakan, tersedianya data yang akurat, penguatan kapasitas lembaga untuk menjalankan program, koordinasi serta dialog yang intensif untuk menghasilkan kebijakan yang relevan.

Pada konteks yang lebih luas, TASS membagikan pengalamannya berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Pada tahun 2016 misalnya, TASS memberikan dukungan teknis kepada Kementerian Agama dalam penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk guru madrasah. Kolaborasi ini menghasilkan regulasi terkait PKB bagi guru madrasah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018, yang saat ini telah diujicobakan pada skala yang lebih kecil. TASS juga bekerjasama dengan Kemendikbud dalam memprediksi dan menghitung jumlah kebutuhan guru. Model penghitungan efisiensi digunakan dan berhasil memetakan pengurangan kebutuhan guru hingga sebanyak 280,000 guru. Sayangnya, rekomendasi efisiensi tersebut belum dapat diimplementasikan pada 2018 karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) yang berwewenang dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) memutuskan untuk menggunakan usulan formasi daerah dalam menentukan kuota perekrutan guru PNS. Penyesuain pendekatan dilakukan TASS dalam menindaklanjuti temuannya, yaitu dengan menyerahkan rekomendasi efisiensi tersebut kepada pemerintah daerah sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun prioritas formasi guru PNS. Dari pengalaman TASS, prinsip literasi menjadi penting, karena implementasi kebijakan dapat dilakukan secara bertahap, sehingga memberi kesempatan kepada penyusun kebijakan untuk melakukan reviu, refleksi dan *self-critique* terhadap kebijakan yang ada, apakah perlu dilanjutkan atau dihentikan. Berkaitan dengan kebijakan pusat yang diimplementasikan di tingkat

Pemerintah memang memiliki kewenangan/ otoritas, namun harus diimbangi dengan keterlibatan dan dukungan banyak pihak, termasuk masyarakat sipil, LSM, peneliti, praktisi, dan kelompok masyarakat yang akan terdampak langsung oleh kebijakan. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi penting, termasuk dalam meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan. Luasnya wilayah Indonesia perlu untuk memasukkan pertimbangan konteks lokal dan sudut pandang inklusi dalam proses penyusunan kebijakan.

daerah, Puslitjakdikbud Balitbang kemendikbud menyampaikan temuan kajian Analisis Biaya Satuan dari Program Indonesia Pintar (PIP). Selama ini, PIP sebagai program bantuan sosial untuk siswa dari keluarga miskin dijalankan dengan pendekatan *one size fits all* (satu ukuran untuk semua). Biaya satuan yang didapatkan oleh siswa memiliki besaran yang sama untuk semua wilayah tanpa memperhitungkan keberagaman kondisi tempat siswa berada. Dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, biaya satuan PIP seharusnya berbeda antar wilayah dengan besaran yang signifikan Di kota besar, biaya satuan PIP jauh berbeda dengan kebutuhan siswa di perdesaan ataupun daerah terpencil. Analisis dengan mempertimbangkan konteks lokal ini sangat penting untuk mendorong kebijakan yang lebih tepat bagi penerima manfaat. Berbeda dengan lima pembicara sebelumnya, MAMPU menyampaikan gagasannya terkait dengan isu inklusi, yang selayaknya tidak dipisahkan dalam fokus penyusunan kebijakan. Berbekal pengalaman bekerja dengan kelompok masyarakat marginal, MAMPU memiliki kesempatan memengaruhi pemerintah daerah untuk menerapkan perspektif inklusi dalam menyusun kebijakan. Perspektif ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan nantinya akan membawa manfaat bagi berbagai kelompok di masyarakat, yang seringkali terbentur pada kenyataan bahwa berbagai upaya menghasilkan kebijakan yang inklusif tersebut masih sangat terbatas.

Salah satu capaian MAMPU adalah bekerja sama dengan LSM lokal dalam mendukung pengembangan model Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK). KLIK merupakan layanan perlindungan sosial dan identitas legal, yang melibatkan konsultasi langsung dengan instansi terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPJS kesehatan. Model ini berhasil meningkatkan layanan di wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, MAMPU juga mendukung pemerintah Daerah Sukabumi untuk melahirkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan KLIK di 386 desa di Kabupaten Sukabumi. Menggabungkan kekuatan masyarakat sipil dan pemerintah menjadi kunci sukses dari gerakan ini, dengan keberadaan program MAMPU yang membantu mempercepat proses implementasi kebijakan yang telah ada.
Kolaborasi menjadi fokus penting dalam upaya membangun kebijakan yang optimal. Hal tersebut diungkapkan Kepala Puslitjakdikbud, Balitbang Kemendikbud sebelum menutup Forum Temu INOVASI yang dihadiri oleh lebih dari 100 peserta tersebut. Pemerintah memang memiliki kewenangan/otoritas, namun harus diimbangi dengan keterlibatan dan dukungan banyak pihak, termasuk masyarakat sipil, LSM, peneliti, praktisi, dan kelompok masyarakat yang akan terdampak langsung oleh kebijakan. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi penting, termasuk dalam meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan. Luasnya wilayah Indonesia perlu untuk memasukkan pertimbangan konteks lokal dan sudut pandang inklusi dalam proses penyusunan kebijakan.

Iterasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas kebijakan, pada sebuah proses kebijakan yang tidak singkat. Pengembangan Sistem Informasi Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (SIP Dikbud) merupakan salah satu inisiatif dalam membangun sistem jejaring dan kolaborasi penelitian. Melalui SIP Dikbud yang tengah dikembangkan oleh Puslitjakdikbud, diharapkan mampu menjadi media yang dapat mendorong kolaborasi yang lebih intens antar berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti dan data.

Budaya Komuter Laut Masyarakat Kota Ternate

Budiana Setiawan

Dalam dunia kerja dewasa ini kita mengenal istilah para komuter, atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan penglaju atau penglajo. Istilah komuter berasal dari bahasa Inggris *commuter,* yang artinya seseorang yang bepergian ke suatu tempat untuk bekerja dan kembali ke tempat tinggalnya pada hari yang sama. Dalam hal ini terdapat jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal dan tempat mereka bekerja. Di Jakarta, misalnya, banyak orang yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang bekerja di perkantoran-perkantoran di pusat kota. Mereka banyak menghabiskan waktu di perjalanan hampir setiap hari, berangkat di pagi buta dan pulang setelah matahari terbenam. Selain Jakarta, banyak kota besar lainnya yang mempunyai jumlah komuter yang tinggi, seperti: Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Untuk dapat menempuh perjalanan jauh pulang pergi setiap hari, diperlukan sarana transportasi yang memadai untuk para komuter tersebut. Untuk kota metropolitan seperti Jakarta, banyak pilihan sarana transportasi yang dapat digunakan oleh para komuter, mulai dari kereta rel listrik (KRL), *Mass Rapid Transportation* (MRT), bus kota, angkot, ojek, taksi, hingga kendaraan pribadi (baik sepeda motor maupun mobil). Banyak hal yang menyebabkan mereka tidak dapat memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat mereka bekerja, seperti: harga rumah yang mahal atau sewa kontrakan yang tinggi. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan lain, selain bertempat tinggal yang cukup jauh dari tempat mereka bekerja. Dengan demikian, aktivitas para komuter menjadi budaya baru yang tumbuh di kota-kota besar.

Kapal cepat untuk penyeberangan Ternate-Sofifi

Namun, apakah budaya komuter hanya terjadi di kota-kota besar saja? Melihat kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, tampaknya budaya komuter tidak hanya terjadi pada mereka yang melakukan perjalanan darat, tetapi juga terjadi pada mereka yang melakukan perjalanan laut. Mereka adalah para komuter laut, berangkat kerja dari pulau satu ke pulau lainnya dan pulang kembali pada hari yang sama. Salah satu daerah di mana banyak orang yang melakukan budaya komuter laut adalah masyarakat Kota Ternate, khususnya para pegawai Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Mereka setiap hari harus melakukan perjalanan laut dari Ternate menuju ke Sofifi, pusat perkantoran Provinsi Maluku Utara yang terletak di Pulau Halmahera.

Mengapa hal ini bisa terjadi?
Hal ini tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Provinsi Maluku Utara, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku. Pulau-pulau di wilayah bagian utara Kepulauan Maluku, seperti: Ternate, Tidore, Obi, Halmahera, Morotai, Bacan, dan lain-lain, pada masa lalu merupakan bagian dari Provinsi Maluku. Namun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara (bersama-sama dengan Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat) pada tanggal 4 Oktober 1999, maka wilayah-wilayah bagian utara Kepulauan Maluku tersebut menjadi bagian dari provinsi baru, yang bernama Maluku Utara. Dalam undang-undang tersebut juga diamanatkan bahwa Ibu kota Provinsi Maluku Utara ditetapkan di Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera. Namun Sofifi pada waktu itu hanya merupakan Ibu kota Kecamatan Oba Utara yang masih sepi dan jarang penduduknya, sehingga belum siap dengan sarana dan prasarana sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, sambil menunggu pembangunan gedung-gedung perkantoran selesai,

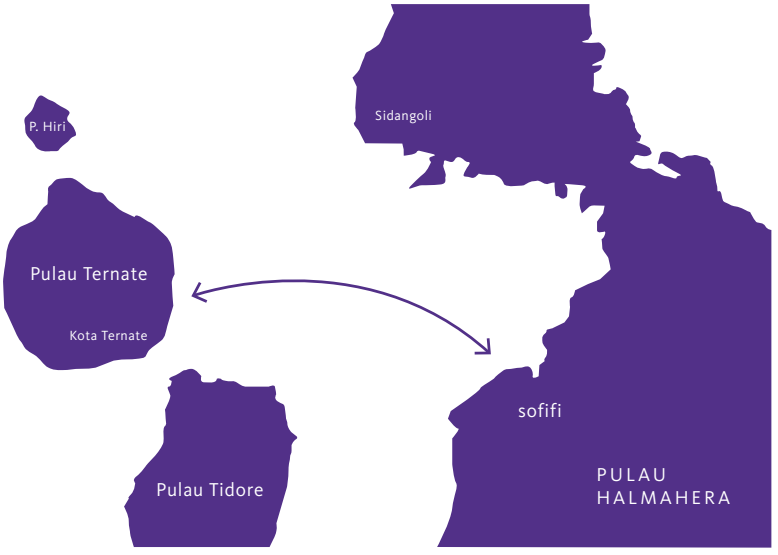

Kota Ternate yang terletak di Pulau Ternate ditetapkan sebagai Ibu kota sementara. Alasan bahwa Sofifi lebih dipilih untuk menjadi Ibu kota Provinsi Maluku Utara dibandingkan dengan Kota Ternate (yang sebenarnya telah menjadi pusat perdagangan yang ramai), karena kota tersebut berada di pulau kecil yang lahannya sangat terbatas dan tidak mungkin dikembangkan lagi. Di samping itu, Kota Ternate terletak di kaki Gunung Gamalama yang merupakan gunung berapi aktif, sehingga rawan terjadi bencana bila gunung tersebut meletus. Apabila Gunung Gamalama meletus dahsyat, dapat dipastikan kegiatan pemerintahan di Provinsi Maluku Utara akan terhenti.

Terbentuknya Provinsi Maluku Utara juga menyebabkan sebagian pegawai pemerintahan di beberapa kabupaten/ kota yang menjadi bagian dari wilayah Maluku Utara direkrut menjadi pegawai pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini karena sejak awal Kota Ternate diamanatkan sebagai Ibu kota sementara, maka banyak pegawai dari Pemerintah Kota Ternate yang kemudian direkrut menjadi pegawai Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jumlah pegawai yang direkrut ke pemerintahan Provinsi Maluku Utara pada saat itu mencapai sekitar tiga ribuan pegawai, yang tersebar di 26 satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sofifi baru diresmikan sebagai Ibu kota Provinsi Maluku Utara pada tanggal 4 Agustus 2010, atau hampir 11 tahun setelah terbentuknya Provinsi Maluku Utara. Sejak saat itu seluruh aktivitas perkantoran pemerintahan provinsi dialihkan dari Ternate ke Sofifi. Kondisi ini menyebabkan para pegawai pemerintahan Provinsi Maluku Utara yang sudah telanjur memiliki tempat tinggal di Kota Ternate enggan untuk pindah ke Sofifi. Dapat dikatakan lebih dari 90% dari sekitar tiga ribuan pegawai pemerintahan yang tetap memilih bertempat tinggal di Ternate daripada pindah ke Sofifi. Sebagai konsekuensinya, mereka menjadi masyarakat komuter laut, berangkat menuju Sofifi pada pagi hari dan pulang kembali ke Ternate pada sore harinya.

Antara Pulau Ternate dengan Pulau Halmahera terbentang laut dengan jarak sekitar 13 mil laut atau 24 km. Untuk berangkat menuju Sofifi maupun kembali ke Ternate, para pegawai hanya mempunyai dua pilihan sarana transportasi, yakni menggunakan kapal cepat milik para pengusaha setempat atau kapal ferry milik PT Angkutan

Kapal ferry rute Ternate-Sofifi untuk penyeberangan penumpang maupun kendaraan bermotor.

Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP). Perjalanan dengan kapal cepat ditempuh dalam waktu 45 menit, dengan tarif Rp 50.000,-. Sedangkan dengan kapal ferry membutuhkan waktu 1 jam 20 menit, dengan tarif sebesar Rp 20.000,-.

Berbeda halnya dengan budaya komuter melalui jalur darat, para pelaku komuter laut menghadapi permasalahan teknis yang lebih besar daripada para pelaku komuter darat, karena medan perjalanan yang harus dilalui adalah laut. Mobilitas melalui laut seringkali terkendala dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah dan sulit diprediksi. Apabila cuaca sedang tidak kondusif, seperti: ombak tinggi, angin kencang, atau hujan lebat, maka aktivitas penyeberangan harus dihentikan atau ditunda sampai cuaca kondusif kembali. Menurut informasi, kondisi cuaca yang tidak bersahabat tersebut lebih sering terjadi pada sore hari daripada pagi hari. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko ombak besar dan angin kencang, banyak pegawai yang memilih pulang kerja lebih awal daripada jam kerja yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi lainnya adalah biaya perjalanan dengan menggunakan transportasi laut relatif lebih mahal daripada transportasi darat. Hal ini menyebabkan para pegawai harus mengalokasikan biaya transportasi dalam jumlah cukup besar.

Mobilitas melalui laut juga lebih berisiko terhadap keselamatan para komuter dibandingkan dengan mobilitas melalui darat. Sebagai misal, apabila para komuter darat yang menggunakan KRL tiba-tiba mengalami gangguan listrik di tengah perjalanan, maka para komuter dengan mudah turun untuk berganti sarana transportasi lainnya. Berbeda halnya para komuter laut yang menggunakan kapal ferry ataupun kapal cepat. Apabila ada kerusakan pada kapal yang mereka naiki, maka berisiko tenggelam atau terbawa arus laut, sehingga harus segera mendapat pertolongan dari kapal-kapal lain yang melintas. Oleh karena itu para operator sarana transportasi tersebut harus memastikan bahwa kapal ferry atau kapal cepat mereka tidak akan mengalami gangguan selama dalam perjalanan, hingga ke tiba di pelabuhan yang dituju.

Risiko perjalanan yang lebih besar serta pengeluaran biaya yang lebih pada moda transportasi laut tersebut berimbas pada kinerja para pegawai Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dapat dikatakan cukup relatif lebih rendah dibandingkan dengan pegawai pemerintahan di provinsi-provinsi lainnya. Banyak pegawai yang sering tidak masuk kerja dengan alasan untuk menghemat pengeluaran untuk transportasi. Di sisi lain, banyak pula pegawai yang pulang lebih awal daripada jam kerja kantor yang telah ditetapkan, dengan alasan menghindari cuaca yang tidak bersahabat ketika akan pulang kembali ke Ternate. Kondisi para komuter laut yang berimbas pada kinerja pegawai tersebut memang konsekuensi yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Berebut Pilihan Ke Sekolah Favorit: Favorit Untuk Siapa?

Bambang Suwardi Joko

Seperti menjadi rutinitas menjelang tahun ajaran baru, orang tua, sekolah, maupun pemerintah disibukkan dengan berbagai prosedur Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Utamanya orang tua, biasanya berlomba mencari lembaga pendidikan yang dinilai terbaik bagi anak-anak dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua seringnya berkeinginan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah berlabel "unggulan" atau "favorit".

Istilah Sekolah Favorit sebenarnya tidak dikenal secara formal dalam nomenklatur pendidikan di Indonesia. Labelisasi Sekolah Favorit menjadi jamak digunakan oleh masyarakat kepada sekolah dengan kriteria hasil belajar dan ketersediaan fasilitas sekolah yang dinilai lebih baik dibandingkan sekolah kebanyakan. Penelitian dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Balitbang Kemendikbud berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Sekolah yang Dianggap Favorit" menunjukkan fakta bahwa hampir di setiap daerah, keberadaan sekolah favorit semakin berkembang dan menarik perhatian masyarakat pada masa PPDB.

Istilah Sekolah Favorit pada mulanya muncul sebagai indikasi dari penilaian masyarakat pada sekolah dengan jumlah peminat lebih banyak dibandingkan sekolah lainnya ketika PPDB. Berbagai persepsi terbangun di tengah masyarakat memandang label Sekolah Favorit tersebut, selain jumlah orang tua yang memilih sekolah tersebut bagi anak-anak mereka, juga termasuk di dalamnya tentang fasilitas yang dimiliki sekolah dan beberapa alasan lainnya. Namun bagaimana pun, menyematkan label Sekolah Favorit tidak dapat dinilai formal mengingat tidak adanya aturan tertulis yang menjadi landasan atas pemberian label tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "favorit" sebagai sesuatu yang diharapkan (dijagokan, diunggulkan) untuk menjadi juara. Dalam referensi lain, Sekolah Favorit dimaknai sebagai sekolah yang salah satu indikatornya adalah jumlah peminat calon siswa yang banyak, bahkan melebihi daya tampung sekolah tersebut, dijadikan pilihan pertama, serta memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik di banyak kejuaran yang diikuti (Wijayakusumah, 2006). Sekolah favorit (*favorit school*) merupakan istilah lain dari sekolah yang efektif (*effective school*), yang menurut Zainal, dkk. (2014) dalam *The Economics of Education*: Mengelola Pendidikan secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendidikan Bisnis, dimaknai sebagai sekolah dengan input, proses pendidikan dan menghasilkan output/lulusan yang juga baik.

Zainal juga mendefinisikan ciri sekolah favorit atau sekolah efektif dengan lima karakteristik yaitu: **1)** pelaksanaan pengelolaan kelas yang baik; **2)** kemampuan akademik siswa yang tinggi; **3)** tersedianya mekanisme pengawasan yang baik terhadap siswa; **4)** peningkatan pengajaran yang menjadi prioritas sekolah; dan **5)** memiliki kejelasan arah dan tujuan sekolah.

Melihat sejarahnya, sekolah-sekolah yang dianggap favorit tidak muncul begitu saja. Keberadaan sekolah favorit sudah terbentuk lama dan malah diberikan ruang dan kesempatan oleh pemerintah agar sekolah dapat saling bersaing mengejar kualitas. Budaya sekolah favorit adalah budaya yang terbangun secara jangka panjang. Pemerintah menyadari bahwa membangun budaya dan label tersebut, tidak melalui jangka waktu yang hanya sebentar. Sekolah dengan label favorit telah berdiri puluhan tahun yang lalu.

Pada tahun 1994, Kemendikbud ketika itu pernah memperkenalkan Kebijakan Sekolah Unggulan (majalahpendidikan.com, 2011). Kebijakan tersebut muncul dalam rangka memenuhi pencapaian keunggulan keluaran (*output*) pendidikan di Indonesia, yang ketika itu diyakini perlunya masukan (*input*) yang juga berkualitas seperti guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, sarana penunjang serta program pendidikan. Semuanya itu diarahkan untuk mendukung pencapaian pendidikan Indonesia yang unggul. Struktur sekolah

pun sangat tergantung pada bentuk organisasi yang menyelenggarakannya. Ada tiga tipe atau model manajemen sekolah unggulan saat itu yang dikembangkan, yaitu: **1)** Yayasan swasta yang bekerjasama dengan sekolah umum; **2)** Sekolah unggul yang didirikan oleh yayasan swasta yang bekerjasama dengan yayasan swasta lain; serta **3)** Sekolah unggul yang didirikan oleh yayasan swasta tunggal.

Pada tahun 2006, pemerintah meluncurkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Dalam perjalanannya, siswa yang dapat menikmati pendidikan di RSBI tidak lagi sekadar dilihat berdasarkan kemampuan akademisnya, tetapi juga didasarkan pada kemampuan ekonomi yang telah ditetapkan sekolah. Tuntutan kualitas pembelajaran dan mutu keluaran, dikorelasikan dengan ketersediaan fasilitas belajar mengajar di atas standar sekolah pada umumnya. Kenyataannya, tidak sedikit orang tua yang rela mengeluarkan finansial lebih besar demi menyekolahkan anak-anaknya di RSBI. Kebijakan RSBI memang sudah dihentikan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2013. Namun, kebijakan tersebut justru menyisakan permasalahan yang berpotensi mengkhawatirkan bagi pendidikan Indonesia di kemudian hari. Sekolah-sekolah yang dulunya adalah RSBI tetap dinilai unggul dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, termasuk fasilitas dan layanan yang diberikan kepada sekolah yang dulunya adalah RSBI. Kondisi ini memunculkan fenomena sekolah unggul tidak hanya berada di kota-kota besar, tetapi juga di kabupaten, menyebar di seluruh Indonesia dengan kriteria dan penilaian yang beragam. Sekolah favorit kemudian menjelma sebagai jaminan mutu prestasi, fasilitas pendidikan kelas satu, layanan pendidikan berstandar tinggi, hingga kuatnya jaringan alumni yang kemudian menjadi daya tarik memilih sebuah sekolah.

Hasil penelitian, yang dilakukan melalui survei online melibatkan 2033 sampling orang tua di 32 SMA negeri eks RSBI dan 30 SMA negeri regular, menemukan fakta bahwa orang tua siswa di sekolah eks RSBI mempersepsikan dengan memasukkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit, akan memberikan harapan lebih besar bagi kesempatan anaknya diterima ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pandangan sedikit berbeda dari orang tua siswa di SMA negeri regular, yang beranggapan bahwa sekolah yang dianggap favorit adalah sekolah dengan berbagai prestasi akademik dan non akademik yang diraih sekolah tersebut.

Persepsi orang tua siswa SMA eks RSBI di 5 kota besar di pulau Jawa dalam memilih sekolah diperoleh melalui sepuluh pernyataan terkait sekolah favorit. Sepuluh pernyataan tersebut adalah: **1)** Jumlah berbagai dukungan program dari pemerintah kepada sekolah (eks sekolah RSBI, sekolah model, sekolah rujukan, sekolah adiwiyata, dll.); **2)** Memiliki berbagai prestasi akademis di sekolah; **3)** Memiliki berbagai prestasi non akademis (olahraga, seni budaya, pramuka, paskibra dll.); **4)** Informasi dari orang tua/saudara/kerabat; **5)** Kepemilikan terhadap fasilitas sekolah yang lengkap (Laboratorium, ruang kesenian, lapangan olahraga, dll.); **6)** Banyaknya kegiatan ektrakurikuler; **7)** Banyaknya Lulusan yang diterima di PTN; **8)** Merasa bangga jika diterima di sekolah ini (prestise); **9)** Ketersediaan guru yang mayoritas dinilai kompeten; dan **10)** Motivasi belajar anak semakin meningkat karena untuk bisa diterima perlu bersaing dengan ketat.

PERSENTASE RESPON ORANG TUA TERHADAP KETERPILIHAN SUATU SEKOLAH

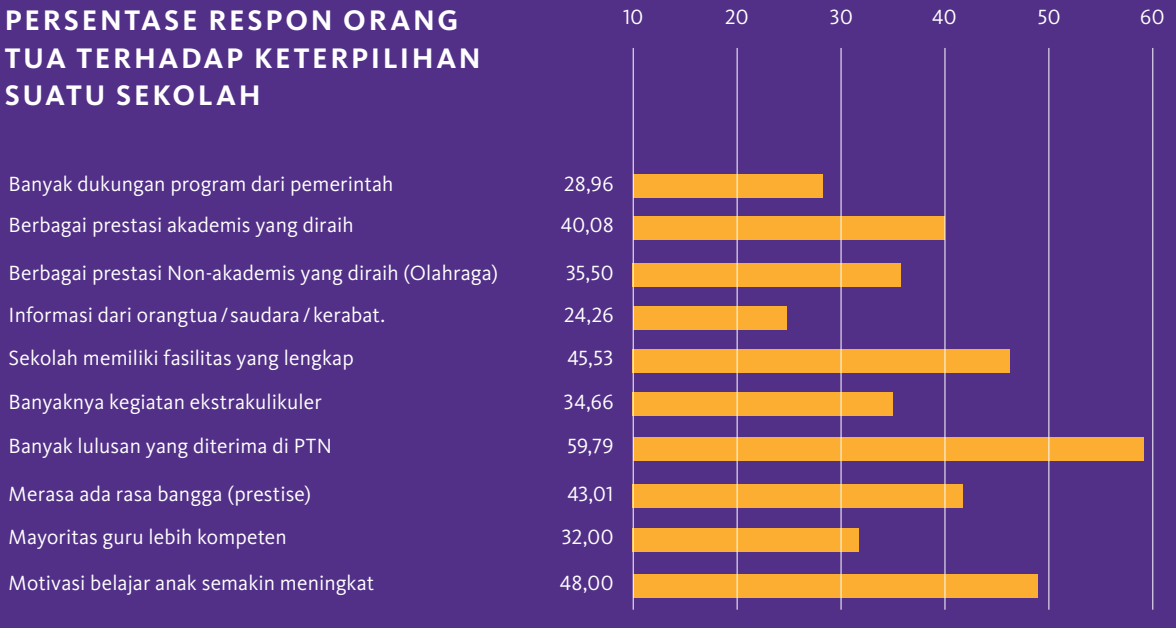

BSNP Siapkan Draf Akhir Standar Isi

Imam Prihadiyoko

Dari kiri
Dr. Kiki Yuliati, M.Sc. (Anggota BSNP), Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. (Ketua BSNP), ambang Suryadi Ph.D (Anggota BSNP)

menjelaskan kepada Peserta tentang Draf SKL dan Standar Isi dalam acara Workshop Penelaahan Draf SKl dan SI Jakarta 18/08/19

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyelenggarakan *workshop* penelaahan draf standar isi, di Jakarta, 18-20 Agustus 2019. *Workshop* ini, selain dihadiri anggota BSNP, juga dihadiri 80 pengembang dan *reviewer* yang akan fokus pada standar isi dan penilaian.

Ketua BSNP Abdul Mu'ti dalam pembukaan *workshop* itu mengatakan, *workshop* ini untuk menyelesaikan draf standar isi yang sudah dipersiapkan. Ia berharap, pertemuan ini akan menghasilkan draf akhir yang bisa ditetapkan untuk standar isi di tiga jenjang pendidikan.

Hal yang pertama, Mu'ti mengatakan, standar isi disusun dengan pendekatan struktural. Acuan yang digunakan adalah UUD 1945, tujuan didirikannya negara Indonesia, diantaranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian Pasal 31 UUD 1945, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional, beserta semua turunannya.

"Turunannya itu secara klasik disebutkan tentang tujuan institusional dan tujuan kurikuler. Semua harus mengacu kesana. Jangan sampai, standar

Totok juga mengajak untuk merenungkan kembali, kemana arah pendidikan nasional selama 15 tahun terakhir. "Saat ini, mungkin memerlukan penyesuaian dengan perkembangan yang ada," ujarnya.

isi yang kita buat tidak inline dengan hirarki tujuan yang memang menjadi bagian dari arah dan panduan pendidikan, beserta seluruh standar yang ada di dalamnya," ujarnya.

Kedua, standar isi yang dibuat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan delapan standar yang ada. Sehingga tentu saja, standar isi itu, semaksimal mungkin bisa menggambarkan keterkaitan antara satu standar dengan yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan.

"Karena dengan cara kompetensi lulusan itu, kita kembangkan kurikulum dan sebagian dari kurikulum itu adalah mata pelajaran dan isi dari bidang studi itu," ujarnya.

Ketiga, standar isi dibuat dengan pendekatan dan pertimbangan yang berkaitan dengan kematangan peserta didik. Terutama yang berkaitan dengan aspek perkembangan, dan aspek lain yang menyatu dengan tingkat kemampuan baik dari sisi *knowledge, value* maupun *skills*.

"Jangan sampai materi yang ditetapkan terlalu tinggi dari kompetensi yang seharusnya dikuasai oleh peserta didik," ujarnya.

Keempat, ada kritik bahwa standar isi yang ada terlalu menekankan pada isi atau materi, dan isinya terlalu berat. Kritik ini muncul dari beberapa kalangan. Eksplorasi yang berkaitan dengan kemampuan abad 21 juga harus diberikan ruang, untuk pengembangan dan aktualisasinya.

Berbasis Standar

Totok Suprayitno, Kepala Balitbang Kemdikbud pada pembukaan *workshop* itu mengatakan, bangsa ini patut bersyukur, karena negara sudah berkomitmen untuk menerapkan pendidikan berbasis standar. Ini juga merupakan amanat PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kritik semacam ini, menurut Totok, perlu dipahami sebagai peringatan tentang kondisi pendidikan nasional. Inilah yang menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pengelola pendidikan nasional, yang harus bisa dicarikan solusi, demi peningkatan kualitas pendidikan nasional yang menjadi amanat pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurutnya, BSNP periode pertama, sudah menetapkan delapan standar pendidikan. Standar inilah yang menjadi basis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kedelapan standar pendidikan itu adalah: Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. **"Ini merupakan turunan dari UU Sisdiknas**,"ujarnya. Ikutannya, lanjut Totok, seluruh sekolah harus mengikuti standar, mulai dari kurikulum, pengujian dan seluruh proses harus mengacu pada standar.

"Apalagi, Standar Nasional Pendidikan ini sudah 14 jelang 15 tahun dan dipercaya sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan Indonesia," ujarnya.

Namun, Totok juga mengajak untuk merenungkan kembali, kemana arah pendidikan nasional selama 15 tahun terakhir. **"Saat ini, mungkin memerlukan penyesuaian dengan perkembangan yang ada,"** ujarnya.

Selama perjalanan reformasi pendidikan, ia meyakini, para pendiri standar pendidikan, tentu berfikir yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Namun, ia juga mengingatkan agar melihat lagi standar pendidikan yang

ada, untuk melakukan berbagai penyesuaian dengan perkembangan yang ada saat ini. Selain itu, dapat menerjemahkan dengan lebih baik dari amanat pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, amanat ini kemudian dirinci lagi dalam UU Sisdiknas, terutama pasal 4 (empat), yang kemudian diwujudkan dalam SKL yang lebih detail, SKL dalam standar konten atau isi, standar proses, dan standar penilaiannya.

Dalam perkembangannya, menurut Totok, standar seolah-olah diimani sebagai kitab suci bagi penyelenggara pendidikan. Tidak heran, jika pengelola sekolah ditanya, apa tujuan pendidikan, jawabannya adalah menyelenggarakan pendidikan sesuai standar pendidikan.

Sebagai orang tua, menurutnya, wajar jika mempunyai sejumlah harapan. Apa yang mereka harapkan ketika memasukkan anaknya ke sekolah. Kenyataannya, Totok menilai, ketika memilih sekolah untuk anaknya, para orang tua tidak melihat apakah sekolah tersebut sudah memenuhi delapan standar atau belum. Mereka mempunyai pertimbangan lain.

"Jadi ada ketidaksesuain, antara yang dilakukan pengelola pendidikan dan yang diharapkan orang tua sebagai konsumen. Orang tua banyak yang melihat, memasukkan anaknya ke sekolah dengan pertimbangan agar anak bisa cerdas, berbudi pekerti dan seterusnya. Keinginan yang lebih sederhana lain, agar anaknya dapat naik ke jenjang pendidikan berikutnya di sekolah yang lebih baik, mereka menjadi terampil dan mudah mendapatkan kerja," ujarnya.

Fakta standar nasional pendidikan lainnya, menurut Totok, apakah saat ini sudah berhasil mencapai cita-cita yang diamanahkan UU Sisdiknas.

"Kita lihat bukti dan capaian hasil pembangunan pendidikan, banyak memberikan sukses dari beberapa aspek. Sekolah dibangun terus, tiap pagi makin banyak anak bersekolah. Wajib belajar sembilan tahun sudah tuntas, kecuali di beberapa kantong yang masih sulit di akses. Dan bahkan wajib belajar 12 tahun sudah 80 persen. Angka Partisipasi Kasar, Indeks Pembangunan Manusia dari pendidikan juga bagus, kontribusi pendidikan juga bagus. Dari sisi layanan pendidikan kita sukses besar. Negara dengan jumlah pendudukan besar, demografi yang sangat sulit," ujarnya.

Namun, Totok mengingatkan, kalau dilihat dari mutu lulusan, ternyata masih banyak yang tidak memenuhi SKL. Ia mengungkapkan, dalam PISA (*Programme for International Student Assessment*), memang ada peningkatan, tetapi belum signifikan. Bahkan, ada yang mengatakan, untuk mencapai kualitas terbaik dalam PISA itu, dibutuhkan waktu 150 tahun.

"Bahkan di media disebutkan kita sedang dalam keadaan darurat matematika. Anak-anak kita yang disampel secara random, tidak bisa menyelesaikan soal matematika yang sangat dasar," ujarnya.

Kritik semacam ini, menurut Totok, perlu dipahami sebagai peringatan tentang kondisi pendidikan nasional. Inilah yang menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pengelola pendidikan nasional, yang harus bisa dicarikan solusi, demi peningkatan kualitas pendidikan nasional yang menjadi amanat pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Algoritma Masa Lalu dan Intranet Pesantren

Iman Zanatul Haeri

Terpilih mengikuti *workshop* ALCoB *Internet Volunteer* (AIV) pada tanggal 6-8 Agustus 2019 di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemendikbud) merupakan pengalaman berharga bagi seorang Guru Sejarah yang mengajar di Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah. Dalam acara tersebut peserta diajak berdialog dan bertukar pendapat dengan beberapa pembicara yang merupakan guru-guru dari Korea Selatan. *Workshop* ini diikuti oleh dua puluh guru dari seluruh Indonesia dan berbagai latar keilmuan seperti Teknologi Informasi, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah dan berbagai jenjang dari guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, MTs, dan MA. Materi yang disampaikan oleh para guru dari Korea Selatan tersebut mencakup *Digital Textbook, Computational Thinking, Robot Science, Albert Coding Robot, Drone, Simple ICT in Classroom*, dan *Korean Culture*. Secara garis besar, semua materi tersebut merupakan pengenalan *e-learning* kepada 20 guru di Indonesia yang terpilih ini agar berbagi pengalaman mengajar di kelas.

Kegiatan *workshop* yang meliputi pembuatan robot dari tingkat dasar seperti merakit, menyusun sistem perintah pada robot 'Albert' hingga pengalaman menggunakan *drone* ini memang tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran Sejarah. Namun rangkaian acara selama 3 hari tersebut bukan memperkenalkan robot sebagai *user experience* tapi sebagaimana kita menggunakan gadget sehari-hari. Penggunaan robot justru berfungsi untuk memperkenalkan *Computational Thinking* (CT) atau cara berpikir komputasi. CT berperan penting dalam kemajuan Korea Selatan yang mencakup bidang ekonomi, teknologi hingga budaya.

Dari Korea Hingga Abbasyiah

Lima puluh tahun yang lalu, Korea Selatan bukan apa-apa. Dalam permulaan Perang Korea (1953), seorang petinggi Militer AS yang terlibat dalam perang tersebut menyatakan dengan sinis, butuh seratus tahun untuk memulihkan kemiskinan dan kemunduran di negeri tersebut. Namun tidak disangka, baru setengah abad, Korea Selatan sudah menjadi Negara paling maju di Asia

bahkan menjadi negara pengimpor teknologi paling ternama.

Kita mengenal produknya yang paling terkenal seperti produk elektronik dan telepon genggam. Selain di bidang ekonomi dan teknologi, Korea Selatan kini dikenal sebagai pusat kebudayaan populer karena berhasil menghipnotis jutaan remaja di dunia untuk meniru semua produk budaya korea dari gaya hidup, musik, film hingga drama. Dalam kajian budaya disebut *K-Pop* atau budaya Populer Korea. Berbeda dengan kebudayaan populer di masa keemasan televisi, *K-Pop* diminati masyarakat global karena ditunjang oleh sebaran informasi dari media sosial seperti *Youtube*. Cara kerja media sosial dalam membagi informasi tetap berdasarkan pada CT.

Cara berpikir komputasi (CT) berkembang menjadi *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan ketika dianggap bisa bekerja sendiri. 3 prinsip utama dalam CT yaitu algoritma, *sequence* (urutan), dan *coding* (pemrograman). Tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah (*Problem Solving*).
Salah satu guru, Mr. Hyung-Joon Hwang, mencontohkan bagaimana pemrograman memiliki 3 dasar struktur, yaitu *sequence* (urutan), *selection* (maka-jika), dan *repetition* (pengulangan).

Saat ditanya oleh salah satu peserta mengenai sejak kapan siswa Korea diajarkan 3 dasar struktur pemrograman, Mr. Joon menjawab bahwa hal tersebut sudah diajarkan sejak *level primary school* (sekolah dasar). Hal ini menjawab mengapa kemajuan Korea Selatan sangat pesat dalam lima puluh tahun terakhir. Padahal prinsip utama dari coding dan CT berasal dari penemuan Algoritma. Karena sangat berpengaruhnya, Sejarawan Harari menyebut algoritma konsep tunggal paling penting dalam dunia kita (Harari, 2018:96).
Algoritma berasal dari sebuah nama matematikawan Persia bernama Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir sekitar tahun 780 di wilayah Uzbekistan. Nama Khawarizmi mengacu pada kota Khawarizm tempatnya dilahirkan. Pada masa Khalifah Abbasiyah Al Makmun (786-833), dibangun *Darul Hikmah* (Rumah Kebijaksanaan) yang mengirim semua pelajarnya ke Byzantium dan kota-kota besar lainnya untuk mencari berbagai manuskrip Yunani. Diantaranya beberapa karya Aristoteles dan Ptolemus. Karya Ptolemus sendiri diterjemahkan ke Bahasa Arab oleh Hajjaj Bin Matter dan Humayyun bin Ishaq (Baez, 2015:117).
Menurut Philip K Hitti, orang-orang berbahasa Arab pada pertengahan abad ke-8 dan ke-13 pembawa obor kebudayaan dan peradaban penting yang menyeruak menembus seluruh pelosok dunia. Mereka bangsa Arab memberikan penambahan dan proses transmisi sedemikian rupa sehingga memungkinkan lahirnya pencerahan di Eropa Barat. (Hitti, 2018:196-7)

Selama menjadi seorang pejabat di Darul Hikmah, Khawarizmi menerjemahkan naskah peninggalan Hindu. Tiga ratus tahun kemudian bukunya diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin. Barulah numerik Hindu-Arab tersebut mulai dikenal masyarakat Barat. Sebelumnya masyarakat Barat hanya mengenal numerik Roma yang sangat tidak efisien. Apa yang ditulis Khawarizmi kemudian menjadi basis dasar angka yang kita kenal sekarang.

Setelah mengalami "latinisasi", nama Khawarizmi berubah menjadi Algoritma. Sebagai contoh pada abad pertengahan, algorismus diartikan sebagai sistem bilangan desimal. Kehebatannya karena bisa memecahkan masalah bilangan. Keberadaan desimal mempermudah perhitungan. Pada abad ke-19, Algoritma dimaknai sebagai aturan tahap-tahap untuk menyelesaikan persoalan.
Mengawali abad ke-20, Alan Turing mengikuti instruksi Algoritma untuk menyelesaikan persoalan matematika yang rumit. Saat itulah hari kelahiran abad komputer.

Pada perang dunia kedua, Turing membuat alat bernama *Bombe* yang menggunakan Algoritma untuk memecahkan teka-teki sandi intelijen. Sekarang Algoritma ada dimana-mana. Ia membantu kita dalam berbagai masalah kehidupan. Seperti memilih barang, belanja daring, menunjukan arah (*map*), bahkan memberikan prediksi atas pilihan politik.
Perkembangan lanjutan dari algoritma adalah kecerdasan buatan (AI). Dalam buku marketing kecerdasan buatan, Jim Sterne menyatakan bahwa "... *Tidak mengagetkan bahwa sistem-sistem komputasi akan mengerjakan lebih banyak tugas-tugas dalam periklanan dan pemasaran. Sistem Kecerdasan buatan ... akan bekerja dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia*" (Sterne, 2018:3).

Algoritma Intranet Bagi Pondok Pesantren

Pada sesi akhir, Mr. Hyung-Joon Hwang memaparkan bahwa cara kerja pemrograman sudah sedemikian canggih sehingga seakan-akan teknologi yang kita ciptakan bisa 'berpikir sendiri'. Kesan seperti itu muncul karena kerumitan sistem perintah sudah sedemikian rumit dan canggih. Tentu saja, di antara mata pelajaran lain, mata pelajaran Sejarah paling menantang untuk mulai menggunakan media digital dan pemrograman. Dalam hal ini Sejarah hanya menjadi konten, bukan cara berfikir itu sendiri. Hal ini sangat baik diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Generasi baru kita, para siswa, lebih sering mencari jawaban instan melalui mesin pencari daripada pergi ke perpustakaan. Namun, hal ini merupakan tantangan tambahan, terutama bagi Guru Sejarah yang mengajar di MA Luhur Al-Tsaqafah.

Pada pakemnya, santri yang belajar di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah tidak diijinkan untuk membawa *gadget*, *laptop* dan

sejenisnya. Secara kasat mata hal ini bisa menjadi hambatan besar dalam pembelajaran Sejarah menggunakan teknologi digital. Namun, pengertian penggunaan teknologi digital tidak selalu bahwa siswa harus difasilitasi teknologi digital secara personal atau individual.

Model pembelajaran yang mungkin bisa dilakukan adalah penggunaan media digital secara kolektif dan terbatas. Sebab, kelemahan akses seluas-luasnya bagi siswa dalam menggunakan internet dan teknologi digital adalah lemahnya batasan antara penggunaan konvensional (*game dan media sosial*) dan penggunaan yang fokus pada pembelajaran.

Pembatasan penggunaan teknologi digital di Pondok Pesantren justru menjadi peluang terciptanya sebuah teknologi informasi dan komunikasi internal yang terkoneksi secara terbatas. Artinya, siswa mendapatkan akses informasi yang terpadu dan terawasi. Sebenarnya hal ini hampir mirip dengan kebijakan pemerintah Tiongkok ketika ingin mengembangkan dunia digital dan internetnya sendiri. Internet diubah menjadi intranet. Kini kita melihat bagaimana Tiongkok secara mandiri memiliki perusahaan bidang teknologi informasi yang mendunia dan mandiri, justru karena mereka berhasil mengembangkan media sosial tandingan untuk melayani masyarakatnya sendiri.

Pembelajaran Sejarah di Pondok Pesantren yang sangat jelas membatasi hubungan informasi dari luar secara langsung menjadi peluang diciptakannya sistem informasi terpadu bagi para santri di Pondok Pesantren. Bila kita berkaca pada sejarah *Facebook* yang sekarang menjadi raksasa perusahaan media sosial di dunia, sebenarnya *Facebook* pada awalnya diciptakan di dalam sebuah sistem informasi tertutup bagi para mahasiswa di Harvard.

Tentu tidak ada salahnya mengembangkan sistem informasi yang memacu para santri untuk memanfaatkan teknologi digital di dalam Pondok Pesantren. Pertemuan dengan guru-guru Korea tersebut membuka peluang para guru di Indonesia secara umum dan guru di Pondok Pesantren secara khusus untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan teknologi informasinya sendiri. Kita tidak harus menirunya, justru kita bisa menciptakan *Simple of Control Structures* yang efektif dan cocok bagi kebutuhan para santri serta sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Sumber:
Baez, Fernando. 2015. Penghancuran Buku dari Masa ke Masa. Serpong: Marjin Kiri
Hitti, Philip K. 2018. A Short History of Arabs. Jakarta: Qalam
Harari. 2018. Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia. Jakarta: Alfabet
Sterne, Jim. 2018. Artificial Inteligent for Marketing. Jakarta: PT. Gramedia

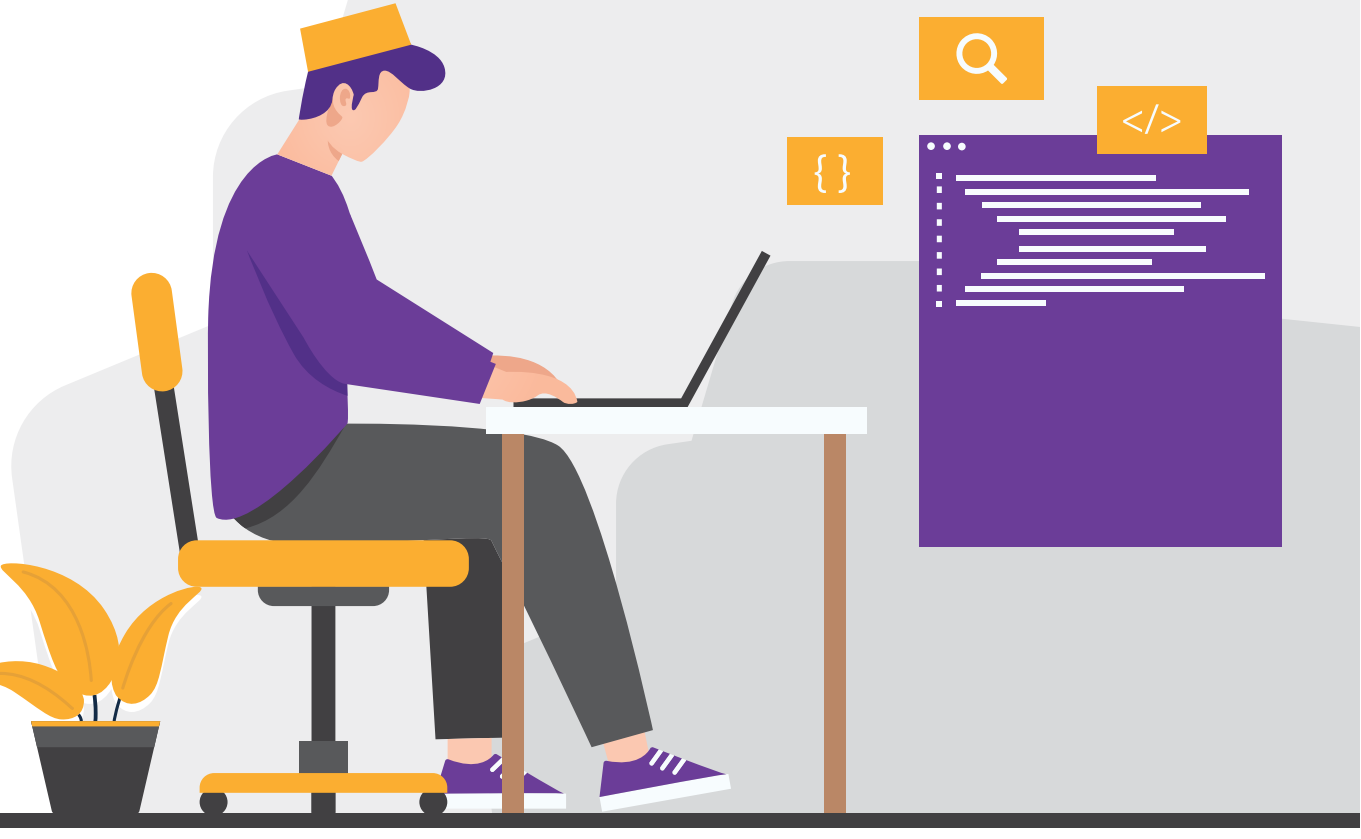

Kolaborasi Berbuah Karya dan Prestasi

Rika Rachmita Sujatma

Sebagai wujud nyata kolaborasi internasional dalam wadah APEC *Learning Community Builders (ALCoB),* para guru dan siswa Yeosu Samil Middle School (Korea), Lagro High School (Filipina), SMA Negeri 1 Subang (Indonesia), Seafield National Secondary School (Malaysia), Patai Udom Suksa School (Thailand) dan Nizhniy Bestyakh Secondary School #2 (Rusia) telah berhasil menyusun *The English-Korean-Filipino-Indonesia-Malaysian-Thai-Yakut Dictionary with Phrasebook*.

Tujuan utama dari kolaborasi pembuatan kamus dan buku percakapan ini adalah untuk menjalin kemitraan antar sekolah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era global yang dimulai sejak tahun 2010. Kolaborasi ini dilaksanakan dalam sebuah program bertajuk *ICT Model School Network*. Kolaborasi ini dilakukan secara daring melalui laman *http://ictmsn.org.* Laman ini memiliki berbagai fitur yang memudahkan para siswa dan guru peserta kolaborasi berkomunikasi satu sama lain dan bertukar informasi dan pengetahuan terkait kebudayaan dan kebiasaan masing-masing negara. Para peserta kolaborasi juga mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan tentang dunia pendidikan dan masyarakat masing-masing negara.

Kolaborasi yang dirancang sebagai upaya mengurangi kesenjangan informasi dan penggunaan teknologi komunikasi juga telah menghasilkan sebuah karya berbentuk kamus dan buku percakapan 7 negara. Kamus ini dipersembahkan kepada siapa pun yang ingin belajar bahasa yang terkandung di dalamnya. Untuk memudahkan para pembelajar, kamus ini dilengkapi dengan daftar alfabet dan transliterasi setiap bunyi masing-masing bahasa. Kamus dan buku percakapan ini berisi daftar kata-kata dan percakapan sederhana yang dianggap penting dalam komunikasi sehari-hari. Dasar bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Korea, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Yakuts.

Pada awalnya kamus dan buku percakapan ini disusun dalam empat bahasa (Bahasa Inggris, Korea, Filipina dan Indonesia). Inisiatif pembuatan kamus ini datang dari Haseon Hwang, seorang *ALCoB Teacher* yang pada awalnya mengajar di Chungdeok Middle School Korea. Inisiatif ini kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan kolaborasi antara Haseon Hwang, Rika Rachmita Sujatma dari SMA Negeri 1 Subang dan Maria Noemi Moncada (Filipina) pada *the 7th International ALCoB Conference* pada bulan November 2009 di Bangkok. Sejalan dengan komunikasi dan pertemuan dengan guru-guru yang berasal dari negara–negara Malaysia, Thailand dan Sakha Republik Rusia yang menunjukkan ketertarikan dan merasakan manfaat yang akan didapat dari kolaborasi ini maka kandungan bahasa kamus dan buku percakapan ini bertambah menjadi 7 bahasa. Sejalan dengan perkembangan jumlah bahasa yang terkandung di dalamnya, kamus ini juga dilengkapi dengan *audio book* yang memungkinkan pembelajar bahasa untuk mendengarkan bagaimana setiap kata dan percakapan diucapkan secara natural.

Kamus ini kemudian dicetak secara terbatas lalu diserahkan kepada sekolah peserta kolaborasi dan menjadi koleksi perpustakaan masing-masing sekolah. Dari pengalaman, kamus ini disukai oleh siswa-siswa penulis dan dijadikan rujukan awal untuk belajar bahasa.

Kolaborasi ini juga dilengkapi dengan sebuah lomba antar siswa sekolah mitra yang terlibat dalam penyusunan kamus yang bertajuk *International Partner Schools Collaborative Online contest* yang dilaksanakan setiap tahun. Lomba ini terbagi dalam empat kategori yaitu penulisan esai, pembuatan poster atau gambar, fotografi dan UCC (*User Created Content*) yang memfasilitasi para peserta lomba untuk membuat video atau film pendek sesuai dengan tema yang ditentukan.

Tema untuk setiap kategori dirancang agar para siswa mampu menjadi warga dunia (*global citizen*) yang visioner, memiliki kompetensi sosial dan empati yang tinggi akan keragaman, perbedaan, toleransi, apresiasi dan cinta damai. Tema-tema tersebut adalah *(1) Introducing your country's culture, (2) history, hero, (3) our school, (4) cyber ethics, (5) My teacher, (6) my dream, (7) feelings and insights about South Korea, the Philippines,* Indonesia, *and Thailand (the country you live in),*

Certificate of Recognition

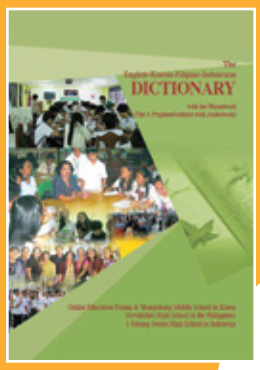

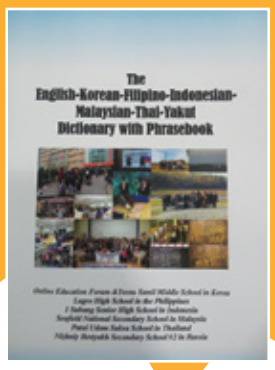

(8) Peace of the world, (9) compassion for the poor, (10) global cooperation.

Penilaian lomba ini dilaksanakan secara berjenjang. Penilaian awal dilakukan di sekolah masing-masing oleh guru setempat dan hasilnya diikutsertakan secara internasional di Korea. Setiap tahun peserta lomba terus meningkat walaupun hadiah lomba yang disediakan oleh ICT MSN sederhana berupa alat tulis dan sertifikat. Namun peserta menyadari lomba ini sangat bermanfaat untuk mengasah keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan keterampilan mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, para pemenang juga meningkat kepercayaan dirinya karena prestasi yang diraihnya. Di Indonesia, sertifikat pemenang juga ternyata dihargai oleh pihak perguruan tinggi karena diakui dan dihargai sebagai nilai tambah dalam pendaftaran melalui SNMPTN.

Kamus dan Buku Percakapan 7 Bahasa versi terakhir yaitu *The English-Korean-Filipino-Indonesia-Malaysian-Thai-Yakut Dictionary with Phrasebook* diserahkan oleh Haseon Hwang kepada Rika Rachmita Sujatma disaksikan oleh pihak Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai koordinator *APEC Human Resources Development Working Group* (HRDWG) Indonesia di acara *ALCoB Internet Volunteer (AIV) Workshop* 2019 di kantor Kemendikbud, Jakarta, 8 Agustus 2019 lalu.

Perlunya Kebijakan Baru Berkenaan dengan Gerakan Literasi Sekolah

Heru Setyono

Implementasi inti gerakan literasi sekolah (GLS) adalah membaca 15 menit sebelum pembelajaran awal dimulai, meskipun dibolehkan di awal, di tengah, atau di akhir jadwal pembelajaran harian. Implementasi dasar ini banyak menghadapi kendala khususnya soal waktu pelaksanaan sebelum awal pembelajaran. Banyak sekolah yang tidak dapat melaksanakan gerakan ini karena banyaknya program pembiasaan (seperti pembiasaan nreligius dan kebangsaan) di sekolah yang menuntut waktu yang sama, yaitu sebelum pembelajaran.

Inisiatif beberapa sekolah akhirnya menetapkan gerakan membaca lima belas menit ini bukan per hari namun seminggu sekali atau dua kali pada hari tertentu. Alih-alih daripada hanya sekadar melaksanakan suatu kegiatan membaca lima belas menit maka diperlukan sebuah kebijakan baru yang lebih sistematis dan programatis yaitu literasi bukan lagi kegiatan di luar pembelajaran namun dimasukan secara serius dan nyata dalam peristiwa pembelajaran di semua mata pelajaran.

Hal ini perlu segera disadari bahwa literasi adalah program serius yang dipromosikan UNESCO dan membutuhkan waktu yang konstan dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, sebagaimana program literasi di berbagai negara maju, literasi dalam pembelajaran merupakan pilihan yang paling logis dan dapat diterapkan oleh semua sekolah dengan segala kondisi. Implementasi selama ini ditengarai memiliki banyak kendala terutama mengenai masalah waktu literasi dan karakteristik "pembelajaran" literasi bagi siswa di sekolah. Oleh sebab itu solusi literasi dalam pembelajaran menjadi penting dan mendesak.

Literasi merupakan inti pendidikan untuk semua (*Education for All).* Literasi secara simultan merupakan hasil (misalnya, membaca, menulis, dan numerasi), proses (seperti, diajarkan dan dipelajari melalui sekolah formal, pendidikan nonformal atau jaringan informal), dan suatu input (langkah menuju: pengembangan keterampilan kognitif; partisipasi dalam peluang belajar sepanjang hayat, pendidikan berkelanjutan) (UNESCO, 2006). Jadi, literasi dan pembelajaran merupakan suatu keharusan yang saling menguatkan satu sama lain.

Kurikulum 2013 diharapkan akan dapat mengembangkan literasi bangsa melalui pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis yang didukung pula oleh Gerakan Literasi Sekolah.

Pengertian literasi yang paling awal merujuk kepada kemampuan membaca dan menulis. Lebih lanjut tidak hanya itu, literasi juga merupakan penerapan keterampilan kognitif tingkat tinggi. Badwen menjelaskan bahwa akibat revolusi teknologi maka pengertian literasi juga ikut berkembang, terutama mengenai teknologi informasi di era internet dan digital. Dengan demikian maka makna yang paling tepat di abad XXI adalah literasi integral, yang terdiri atas tiga aspek utama: literasi fungsional, informasional, dan etikal (Badwen, 2001).

UNESCO (1978) mendefinisikan bahwa seseorang memiliki literasi fungsional jika mampu terlibat dalam berbagai aktivitas yang memerlukan literasi, berfungsi efektif dalam kelompok atau komunitas tertentu. Istilah literasi terikat dengan konteks yang bersifat kontinum, berkembang berkelanjutan melalui proses belajar dan penggunaan, baik di sekolah maupun di latar lainnya sesuai bagi anak dan orang dewasa (Unesco, 2006: 30-34). Literasi di sekolah mengandung arti bahwa bagaimana kemampuan literasi berfungsi dalam kegiatan pembelajaran, dan sekaligus literasi tersebut berkembang dalam pembelajaran. Literasi menjadi fasilitas keberhasilan pembelajaran.

Istilah literasi informasi banyak digunakan dengan berbagai nama seperti *infoliteracy, informacy,* pemberdayaan informasi, kompetensi informasi, keterampilan dan literasi informasi, keterampilan menangani informasi, keterampilan menyelesaikan masalah informasi, dan seterusnya (Biradar&Swapna, 2017). Literasi informasi juga berarti seperangkat kemampuan terpadu untuk menghadapi penemuan

informasi, memahami bagaimana informasi dihasilkan dan dinilai, serta penggunaan informasi untuk menciptakan pengetahuan baru dan individu mampu berpartisipasi secara etik dalam masyarakat belajar (*Association of College & Research Libraries, 2016*).

Menjadi literat pada tataran fungsional dan informasional saja belum cukup, perlu ditambah dengan literat secara etikal. Membaca dan menulis merupakan proses interaksi sosial yang secara simultan melibatkan aspek hak asasi manusia. Dalam hal ini, literasi dipahami sebagai konsep yang integral, berbasis tiga 3 jenis literasi: fungsional, informasional, dan etikal. Pemahaman literasi integral menjadi penting. Literasi integral menjadikan warga negara memperoleh ungkapan tulis yang lebih baik saat membaca berbagai media. Literasi integral juga berkontribusi terhadap pengayaan hubungan interpersonal dan dipertimbangkan sebagai bentuk komunikasi baru (Badwen, 2001).

Ada enam komponen literasi yang harus ada, yaitu:

1.
Membaca teks dan buku-buku lintas mata pelajaran secara lancar dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan apresiasi;

2.
Menulis dalam berbagai jenis teks dalam genre tertentu (deskripsi, laporan, rekon, eksplanasi, eksposisi, prosedur, narasi) lintas mata pelajaran untuk berbagai audiens;

3.
Berbicara, mendengarkan, dan memirsa dengan tujuan dan perhatian lintas mata pelajaran dengan tujuan transfer pengetahuan dan merespon secara kritis dan kreatif;

4.
Mengembangkan berbahasa lintas mata pelajaran yang mentransfer situasi dunia nyata;

5.
Memasukkan keterampilan abad XXI dalam siklus belajar-mengajar (berpikir kritis dan penalaran, literasi informasi, kolaborasi, pengarahan diri, dan invensi); dan

6.
Memanfaatkan teknologi (jika memungkinkan) untuk mengakses, mengolah, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi.

Mendikbud: Kualitas Pembelajaran terus Ditingkatkan

Oky Adrian

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem A. Makarim, melakukan audiensi dengan Kepala & Sekretaris Balitbang Kemendikbud, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktur Jenderal Kelembagaan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah, BAN PAUD & Pendidikan Non Formal, serta BAN Perguruan Tinggi di Kantor Kemendikbud, Jakarta (25/10/2019).

"Pertemuan kali ini untuk menyampaikan informasi terkait standar nasional pendidikan dan akreditasi, serta peluang dan tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas pembelajaran," ujar Kepala Balitbang, Totok Suprayitno, dalam pembukanya. Kemudian sesi dilanjutkan dengan pemaparan penjelasan singkat mengenai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja/lembaga.

Dalam kesempatan ini, Mendikbud menyampaikan poin-poin penting, antara lain teknologi berperan penting di dalam dunia pendidikan. "Namun teknologi tidak dapat mengganti peran guru seluruhnya," tegas Mendikbud. Teknologi dapat digunakan untuk membantu peningkatan kapabilitas guru.

Poin penting lainnya yang Mendikbud sampaikan adalah pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar sumber daya manusia Indonesia menjadi manusia yang maju, unggul, dan berdaya saing. "Saya menekankan kembali bahwa yang ada adalah Visi Presiden dan Wakil Presiden. Seluruh pemangku kepentingan perlu bergotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran," tekan Mendikbud dalam penutupnya.

Audiensi Mendikbud dengan Balitbang, BSNP, dan Badan Akreditasi Nasional Jakarta, 25/10/2019

Penguatan Pendidikan Karakter melalui Penanaman Nilai Pancasila Sejak Dini

Wina Handayani

Bulan Juli 2019 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Peluncuran Program Penanaman Nilai Pancasila sebagai Wahana Pembangunan Watak Bangsa (*Nation and Character Building*), di Kantor Kemendikbud, Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyampaikan pentingnya aspek penanaman nilai Pancasila untuk pembentukan pendidikan karakter. Ia mengimbau semua pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk penanaman nilai Pancasila sedini mungkin.

Hal ini merupakan suatu upaya implementasi terhadap penyempurnaan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang saat ini dirasa kurang mengakomodasi pembelajaran nilai-nilai Pancasila.

Pada kesempatan itu hadir Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Haryono, menyampaikan pendapatnya bahwa pendidikan Pancasila bukan hanya tanggung jawab guru mata pelajaran terkait Pancasila saja, melainkan seluruh warga Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa Pancasila merupakan pendidikan berkualitas untuk semua bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan ideologi, masa depan, dan harapan bangsa.

Sumber Foto:
Ibar Warsita/Sekretariat Balitbang

Disadur dari naskah berita pada laman: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/07/penguatan-pendidikan-karakter-melalui-penanaman-nilai-pancasila

Pentingnya Kemampuan Literasi

M. Yusri Saad

Pendidikan literasi telah menjadi kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan telah dilaksanakan secara luas pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta dalam pendidikan non formal dan formal di luar sekolah. Dasar dari kebijakan itu merupakan kemampuan yang sangat diperlukan bagi peserta didik untuk hidup di zaman sekarang dan akan datang.

Oleh karena itu, diperlukan kajian konsep literasi yang dapat menghasilkan satu konsep literasi yang dapat memayungi beragam pengertian literasi yang banyak digunakan saat ini. Konsep itu perlu disepakati bersama dan dijadikan rujukan dasar bagi pengajaran dan pendidikan literasi di berbagai tataran. Konsep literasi yang dibutuhkan harus cukup luas dan esensial pengertiannya sehingga dapat mencakup berbagai aspek dan dimensi dari literasi, serta dapat menghasilkan konsep-konsep turunan yang jelas dan operasional. Konsep literasi itu harus dapat memberikan batasan yang jelas mengenai pendidikan literasi sekaligus memberikan keleluasaan yang cukup besar untuk diaplikasikan pada beragam jenis literasi.

Literasi dalam arti luas seperti ini telah lama menjadi acuan *UNESCO*. Dalam *Literacy for Life*, laporan *UNESCO* tahun 2006 tentang literasi dunia, dinyatakan, literasi adalah hak dasar manusia sebagai bagian esensial dari hak pendidikan. Sebagai hak, literasi perlu dipenuhi. Dengan terpenuhinya hak literasi, orang dapat mengakses sains, pengetahuan teknologi, aturan hukum, serta mampu memanfaatkan kekayaan budaya dan media. Dalam pengertiannya yang luas ini, literasi dapat dipahami sebagai poros upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan menjadi faktor dinamis dalam pendidikan. Definisi literasi, menurut *UNESCO*, adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengomunikasikan, dan menghitung menggunakan materi tertulis atau tercetak dari berbagai jenis konteks. Literasi merupakan sebuah kontinum pembelajaran agar seseorang dapat mencapai cita-citanya, mengembangkan pengetahuan dan potensinya, dan dapat berpartisipasi secara paripurna baik lingkungannya maupun komunitas yang lebih luas.

Literasi harus dipahami sebagai bagian dari upaya peningkatan daya nalar, diajarkan secara berkesinambungan, dan ditingkatkan secara berjenjang melalui proses peningkatan literasi yang sistematis dari jenjang pendidikan usia dini hingga dewasa. Untuk dapat menjalankan pendidikan literasi seperti itu diperlukan konsep literasi yang memadai.

Sistem pendidikan yang ditetapkan berdasarkan pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang terpisahkan dari kehidupan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Implikasi dari hal ini adalah bahwa pelaksanaan program pendidikan yang berlangsung pada satuan pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan linier berpedoman pada ideologi Pancasila dan UUD 1945. Khusus pelaksanaan program pengajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah refleksi ideologi Pancasila, dan konstitusi UUD 1945 telah dirumuskan dalam Kurikulum 2013 (K-13). Pengembangan program literasi sebagai bagian dari kebijakan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi lulusan pada berbagai jenjang pendidikan. Tujuan tersebut diamanatkan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 sebagai berikut:

K-13 sebagai titik tolak kegiatan belajar mengajar mempunyai empat komponen tujuan pedagogis yaitu (1) kompetensi sikap spiritual,

> "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Keempat tujuan tersebut menjadi rujukan dalam pengembangan literasi untuk menjadikan program literasi dasar untuk mengembangkan pengetahuan dasar peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dengan kompetensi literasi setiap peserta didik diarahkan membaca berbagai konteks kehidupan sosial sebagai dasar untuk menentukan arah hidupnya ketika mereka dewasa. Dengan kompetensi literasi setiap siswa, ketika dewasa nanti mempunyai tanggung jawab untuk membangun kebersamaan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara berdasarkan Pancasila.

Proses pedagogi yang berlangsung melalui proses belajar mengajar di kelas merupakan proses interaksi fungsional antara guru dan siswa serta antar siswa. Dalam proses interaksi tersebut, terdapat dua hal, yaitu mengonstruksi pengetahuan dan menginternalisasikan nilai-nilai kehidupan sosial. Keduanya merupakan proses pengembangan kompetensi literasi. Dengan mempertimbangkan bahwa proses pembelajaran membawa misi mengonstruksi pengetahuan dan menginternalisasi nilai-nilai kehidupan, interaksi yang berlangsung di ruang kelas tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Aspek tekstual dan kontekstual bersifat saling melengkapi. Aspek tekstual memberikan kerangka pedagogis untuk menyeleksi konteks-konteks yang dapat diintegrasikan dalam proses belajar mengajar di kelas, sedangkan aspek kontekstual memperkaya pokok bahasan suatu topik dari mata pelajaran.

Dalam konteks ini, literasi tidak hanya bertitik pada kemampuan membaca teks berdasarkan struktur bahasa dan perbendaharaan kata pada teks tersebut, tetapi lebih jauh lagi sampai kepada pemaknaan teks secara kontekstual. Proses pemahaman terhadap aspek tekstual dan kontekstual harus meningkat secara berjenjang, baik berdasarkan jenjang pendidikan maupun kompleksitas pokok bahasan pada setiap jenjangnya. Pembentukan kompetensi literasi atas setiap pokok bahasan pada setiap mata pelajaran meliputi tiga tahapan, yaitu mengetahui (*knowing*), memahami (*understanding*), dan tahapan tertinggi adalah memaknai (*interpreting*). Pada tahapan mengetahui sampai dengan memaknai merupakan suatu proses berkelanjutan. Pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar aspek tekstual dan konseptual menjadi 2 hal yang sangat beririsan. Apek kontekstual pada jenjang pendidikan dasar merujuk pada kedekatan geografis seperti misalnya lingkungan sekitar rumah/tempat tinggal siswa.

Merujuk pada pembahasan di atas, maka komptensi literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan memaknai berbagai fenomena kehidupan bermasyarakat dan alam yang bersumber dari informasi tekstual dan kontekstual. Dalam proses mengetahui, memahami, sampai dengan memaknai dilakukan melalui proses, mengingat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mendukung pencapaian kompetensi literasi.

Kompetensi literasi sebagai sarana untuk mewujudkan pencapaian misi K-13 mempunyai keterkaitan yang erat dengan struktur dan target K-13 yang dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan dan Standar isi. Dengan demikian arah penetapan kompetensi literasi sebagai bagian dari kebijakan adalah pada pengembangan nalar tekstual dan kontekstual untuk mengetahui, memahami, dan memaknai berbagai fenomena pada saat ini dan masa depan.

Dengan karakteristik kompetensi literasi seperti yang dibahas di atas, maka ketercapaian kompetensi literasi memberikan sumbangan kepada beberapa aspek seperti kebijakan peningkatan mutu pendidikan, penguatan karakter peserta didik, pelestarian nilai budaya nasional, dan berorientasi pada *Higher Order Thingking Skills* (*HOTS*).

Muatan K-13 harus dipahami sebagai kesatuan utuh dari *design* sampai pembelajaran, maka setiap mata pelajaran memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter yang diinginkan, karakter yang dimaksud sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam Pancasila. Sebagai contoh, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) akan menghasilkan manusia (siswa/siswi) yang menguasai IPA dalam hal berkomunikasi, berfikir analitis, kritis dan efisien serta mampu memecahkan masalah-masalah pengetahuan alam dengan baik sebagai cerminan orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, masing-masing mata pelajaran akan memberikan kontribusi dalam menjadikan manusia utuh yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap (moral dan karakter), serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang direfleksikan dalam berbagai konteks kehidupan dalam memecahkan masalah kehidupan nyata di dalam masyarakat.

Dalam memecahkan/menyelesaikan masalah, tentu saja harus mensinergikan sejumlah kompetensi yang ada dalam K-13. Ini merupakan perwujudan dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang menjadi acuan pengembangan kurikulum (K-13). Penjelasan ini sebenarnya merupakan tujuan mendasar dari K-13 sekaligus juga menjadi kebutuhan dan/atau tuntutan untuk mencapai literasi. Literasi yang dikembangkan sejalan Kurikulum 2013 antara lain adalah (1) Literasi Bahasa Dan Sastra (baca dan tulis), (2) Literasi Sains, (3) Literasi Budaya Dan Kewarganegaraan, (4) Literasi Digital/TIK, (5) Literasi Numerasi, dan (6) Literasi Finansial.

Sinergi Tripusat Pendidikan untuk Penguatan Karakter

Biyanto

Menurut diktum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan.

Pengertian tersebut memberikan gambaran betapa pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi anak. Hal itu berarti tugas pendidik adalah menfasilitasi peserta didik agar mengenali potensi dirinya. Tetapi jujur harus diakui, tugas mendampingi anak agar mengenali kekuatan dan kelemahan diri sering diabaikan pendidik. Bahkan orang tua juga sering kurang memperhatikan potensi anaknya. Padahal anak merupakan amanah Tuhan. Orang tua harus memberikan pendidikan dan pengasuhan yang terbaik bagi buah hatinya.

Begitu pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak sehingga al-Qur'an beberapa kali menggambarkan karakter anak. Dalam al-Qur'an, anak dilukiskan sebagai penyejuk pandangan (QS. *Al-Furqan*: 74) dan hiasan hidup di dunia (QS. *Al-Kahfi*: 46). Anak juga digambarkan secara antagonistik, misalnya sebagai musuh (QS. *Al-Taghabun*: 14) dan fitnah atau cobaan (QS. *Al-Taghabun*: 15). Kalam Ilahi ini menunjukkan betapa perhatian al-Qur'an pada anak. Karena itulah, orang tua dan pendidik penting bersinergi untuk mengembangan potensi anak agar sukses menghadapi tantangan masa depa Dalam banyak kesempatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Kabinet Indonesia Kerja, Muhadjir Effendy, juga menekankan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tiga institusi ini populer disebut tripusat (trisentra) pendidikan. Dengan demikian, tidak seharusnya tanggung jawab pendidikan hanya diserahkan pada sekolah. Orang tua atau keluarga juga memiliki posisi strategis untuk mendidik dan mengasuh anak.

Para pendidik di sekolah memang memiliki tanggung jawab mendidik anak-anak dengan sepenuh hati. Tetapi tugas itu dijalankan guru selama anak-anak berada di sekolah. Ketika berada di luar sekolah, pendidikan anak menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Justru lingkungan keluarga dan masyarakat itulah yang banyak membentuk karakter anak. Hal itu karena waktu anak berada di lingkungan keluarga dan masyarakat jauh lebih lama dibanding di sekolah.

Tetapi jujur harus diakui bahwa masih banyak keluarga dan masyarakat yang belum berfungsi sebagai pendidik dan pengasuh yang ideal bagi anak-anak. Bahkan ada keluarga yang mengalami *broken home* sehingga berdampak pada perkembangan jiwa anak. Padahal lingkungan keluarga merupakan bagian dari tripusat pendidikan yang pertama sekaligus terpenting. Hal itu sejalan dengan pernyataan hikmah yang mengatakan; *al-bayt madrasah al-ula* (keluarga merupakan institusi pendidikan yang terutama). Bahkan lebih spesifik disebutkan; *al-umm madrasah al-ula* (Ibu merupakan pendidik yang andal bagi buah hatinya). Pernyataan ini merupakan pengakuan betapa penting peran seorang ibu bagi pendidikan anak. Tatkala anak berada di lingkungan keluarga, orang tualah yang berperan sebagai pendidik (*murabbi*). Bukan sekedar mendidik, orang tua juga harus memberikan keteladanan bagi buah hatinya. Pola pikir orang tua juga harus berubah sesuai dengan tantangan zaman. Apalagi kini orang tua dihadapkan dengan karakter generasi milenial. Pada era ini anak-anak begitu terampil bermedia social (medsos). Kondisi ini meniscayakan orang tua menggunakan pendekatan yang sesuai dengan *Zaman Now.*

Peringatan tersebut penting karena zaman telah berubah begitu cepat. Dunia digital yang menjadi salah satu ciri era industri 4.0 juga menghampiri kehidupan anak. Kini anak-anak pun menjadi bagian komunitas virtual (*virtual community*). Mereka lebih banyak berinteraksi melalui dunia maya atau medsos. Mereka begitu terampil berkomunikasi melalui *blog, facebook, instagram, twitter, telegram, WhatsApp*, dan medsos lainnya. Fakta ini harus menjadi perhatian agar orang tua menemukan metode yang tepat untuk mendidik dan mengasuh buah hatinya.

Tripusat pendidikan yang kedua adalah sekolah. Bagi sebagian besar orang tua, sekolah benar-benar menjadi tumpuhan pendidikan dan pengasuhan anak. Keluarga atau orang tua yang belum *well educated* sangat menggantungkan pendidikan dan pengasuhan anak pada sekolah. Ada juga keluarga yang merasa belum mampu mendidik dan mengasuh anak dengan baik karena kesibukan bekerja. Pada konteks inilah sekolah harus menjadi rumah kedua yang ramah dan nyaman bagi anak-anak. Untuk itulah Kemendikbud mengusung *tagline* "Senang Belajar di Rumah Kedua." *Tagline* ini menarik karena ada komitmen untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang ramah bagi anak-anak. Komitmen menjadikan sekolah sebagai rumah kedua penting karena masih ada banyak insiden kekerasan yang melibatkan pelajar. *Tagline* ini penting untuk menjawab kebutuhan orang tua dan keluarga yang masih memiliki masalah dengan pendidikan dan pengasuhan anak.

Di tengah derasnya pemberitaan mengenai insiden kekerasan pada anak, sekolah seharusnya menjadi tempat yang ramah untuk menyemai nilai-nilai karakter. Disinilah pentingnya sekolah mengimplementasikan konsep pendidikan ramah anak (*friendly child education*). Konsep pendidikan ramah anak jelas membutuhkan komitmen dari seluruh ekosistem sekolah. Lingkungan sekolah juga harus dirancang seramah mungkin sehingga anak-anak merasa nyaman berada di rumah kedua.

Untuk mengimplementasikan konsep pendidikan ramah anak pasti membutuhkan komitmen guru. Guru harus tampil seutuhnya sebagai pendidik yang mendampingi anak-anak. Guru juga dituntut untuk berperan sebagai orang tua sekaligus sahabat bagi anak-anak selama berada di sekolah. Memang tidak mudah menjalani tugas sebagai pendidik sejati. Karena itu, selalu dikatakan bahwa guru sejatinya bukan sekedar profesi. Lebih dari itu, menjadi guru merupakan panggilan hati. Spirit inilah yang seharusnya melekat pada diri setiap pendidik.

Sebagai konsekwensinya, pemerintah dan masyarakat harus memuliakan profesi guru. Salah satu indikator memuliakan profesi guru adalah menjamin kesejahteraannya. Tidak boleh ada guru yang hidupnya jauh dari layak, apalagi menderita. Rasanya tidak pernah terlintas dalam pikiran guru untuk hidup bergelimang harta. Dari awal, mereka pasti menyadari bahwa menjadi guru bukan jalan meraih kekayaan materi. Tetapi, itu bukan alasan untuk tidak mensejahterakan guru. Jika para guru sejahtera, mereka bisa mendidik dengan penuh semangat.

Tripusat pendidikan ketiga adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat dipahami mereka yang peduli terhadap pendidikan (*stakeholders*). Umumnya mereka tergabung dalam komite sekolah, ikatan wali murid, ikatan alumni, dunia industri dan dunia usaha (DUDI), komunitas seni dan budaya, organisasi profesi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Tegasnya, kelompok masyarakat peduli pendidikan dapat berasal dari manapun. Termasuk para alumni yang bekerja di luar negeri.

Kini tugas sekolah dan pemerintah adalah mensinergikan potensi sumber daya keluarga dan masyarakat untuk penguatan pendidikan karakter. Sinergi tripusat pendidikan dibutuhkan untuk mewujudkan generasi emas 2045. Mengapa 2045? Karena pada saat itu negeri tercinta akan merayakan 100 tahun kemerdekaan RI. Pada perayaan seabad kemerdekaan itulah kita akan memperoleh bonus demografi yang. Pada saat itu pula kita berharap akan menyaksikan tampilnya generasi emas yang benar-benar berkarater. Semoga!

Potret Akreditasi Sekolah dan Madrasah Tahun 2018

Dinan Hasbudin

Kebijakan dan Keputusan Penting BAN-S/M

Akreditasi sekolah dan madrasah tahun 2018 dilakukan dengan mengacu pada skala prioritas sebagai berikut: (1) Sekolah dan Madrasah Sasaran Baru dan Tidak Terakreditasi (TT); (2) Sekolah dan Madrasah Reakreditasi dengan kadaluwarsa 2 tahun atau lebih; dan (3) Sekolah dan Madrasah Reakreditasi dengan kadaluwarsa 1 tahun. Yang dimaksud dengan Sekolah dan madrasah sasaran baru adalah sekolah dan madrasah yang belum pernah diakreditasi oleh BAN-S/M. Selanjutnya, BAN-S/M juga menetapkan skala prioritas pada sekolah dan madrasah yang berada di daerah *remote*/ terpencil untuk diakreditasi.

Pada tahun 2018, selain melaksanakan akreditasi Sekolah/Madrasah, BAN-S/M juga melakukan akreditasi terhadap Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) yang memperoleh status ijin sementara dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan akreditasi untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Hasil akreditasi SPK dan SILN tersebut akan dibahas secara terpisah. Untuk menjamin tercapainya target akreditasi yang berkualitas dan kredibel, BAN-S/M telah menetapkan beberapa kebijakan dan keputusan penting, antara lain:

1. BAN-S/M telah menetapkan keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi (BAN-S/M Provinsi) yang sebelumnya diangkat oleh Gubernur sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 13 2018 tentang BAN-S/M dan BAN-PAUD dan PNF pasal 29. Selanjutnya, BAN-S/M juga telah melakukan seleksi dan menetapkan anggota BAN-S/M Provinsi yang telah habis masa keanggotaannya pada tahun 2018 meliputi: BAN-S/M Provinsi Nusa Tenggara Timur, BAN-S/M Provinsi Jambi, BAN-S/M Provinsi DKI, dan BAN-S/M Kalimantan Barat.

2. Semua tahapan proses akreditasi telah dilakukan secara *on-line* yang mencakup: pengisian evaluasi diri sekolah/EDS, audit dokumen terhadap EDS, *mapping* asesor, pengisian hasil akreditasi oleh asesor, validasi, verifikasi dan penetapan hasil akreditasi.

3. Penerbitan sertifikat hasil akreditasi dalam bentuk elektronik.

4. Melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan akreditasi yang meliputi: Pelatihan untuk Pelatih Asesor (PPA), Pelatihan Asesor Baru, Resertifikasi asesor lama untuk menghasilkan asesor berkualitas dan lintas jenjang, dan pelaksanaan Pelatihan Asesor SPK. Seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif.

5. Penugasan asesor secara lintas kabupaten/Kota

6. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018, mulai tahun 2018 BAN-S/M menetapkan kebijakan akreditasi sekolah/madrasah berbasis satuan pendidikan, bukan lagi program keahlian. Dalam Implementasinya, BAN-S/M telah menyempurnakan Instrumen akreditasi yang didukung dengan instrumen *suplemen* yang memuat butir-butir penilaian sekolah/madrasah berbasis *performance* sekolah.

Capaian Hasil Akreditasi

Tabel 1 adalah rekapitulasi hasil akreditasi yang telah ditetapkan oleh

Tabel 1. Jumlah Sekolah dan Madrasah Hasil Akreditasi 2018

SASARAN	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK	JUMLAH	PESEN
BARU	7.885	2.329	4.589	1.453	1.436	884	1.650	20.226	36,3%
REAKREDITASI	22.796	4.771	2.976	1.678	1.291	846	1.132	35.490	63,7%
JUMLAH	30.681	7.100	7.565	3.131	2.727	1.730	2.782	55.716	
PERSEN	55,1%	12,7%	13,6%	5,6%	4,9%	3,1%	5,0%		100,0%

BAN-S/M pada tahun 2018. Dari 54.000 kuota yang telah ditetapkan di awal tahun yang bersumber dari dana APBN Kemendikbud, BAN-S/M telah mengakreditasi sebanyak 55.716 sekolah dan madrasah. Pencapaian target yang melebihi kuota tersebut berasal dari realokasi anggaran dari beberapa provinsi ke provinsi lain, dan karena efisiensi anggaran di beberapa Provinsi.

Dari jumlah 55.716 sekolah dan madrasah yang diakreditasi, sebanyak 20.226 (36.03%) merupakan sasaran baru, dan 35.490 (63.7%) merupakan hasil reakreditasi. Dilihat dari jenisnya, sebanyak 43.755 (78.5%) adalah sekolah, dan 11.961 (21.5%) adalah madrasah. Sedangkan menurut jenjang, 77.8% yang diakreditasi berasal dari pendidikan dasar (SD dan MI), dan 22.2% dari pendidikan menengah. Sebaran hasil akreditasi per jenjang dan jenis sasaran diperlihatkan dalam Tabel 1. Sebaran realisasi sekolah dan madrasah yang telah diakreditasi setiap provinsi disajikan dalam Gambar 1. Berdasarkan data, lebih dari 50% realisasi pelaksanaan akreditasi tahun 2018 berada di 4 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

Berdasarkan peringkat, hasil akreditasi tahun 2018 per jenjang disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 2. Secara keseluruhan, sebanyak 73,6% sekolah dan madrasah terakreditasi dengan peringkat minimum B. Pencapaian peringkat dengan minimum B antarjenjang cukup bervariasi, di mana untuk jenjang SD/MI sebanyak 79,4%, SMP/MTS sebanyak 60,0%, SMA/MA sebanyak 65,2%, dan untuk SMK sebanyak 60.8%. Hasil analisis akreditasi per jenjang dan per jenis sasaran dibahas pada sub-bab berikutnya, di mana dari hasil tersebut dapat dibedakan pencapaian hasil akreditasi

Tabel 2. Peringkat Akreditasi Per Jenjang

JENJANG	PERINGKAT A		PERINGKAT B		PERINGKAT C		TT		JUMLAH	%
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
SD/MI	7.221	19,1%	22.778	60,3%	6.575	17,4%	1.207	3,2%	37.781	67,8%
SMP/MTS	2.149	20,1%	4.266	39,9%	3.531	33,0%	750	7,0%	10.696	19,2%
SMA/MA	1.154	25,9%	1.754	39,4%	1.252	28,1%	297	6,7%	4.457	8,0%
SMK	440	15,8%	1.253	45,0%	879	31,6%	210	7,5%	2.782	5,0%
JUMLAH	10.964	19,7%	30.051	53,9%	12.237	22,0%	2.464	4,4%	55.716	100,0%

Gambar 1. Jumlah Sekolah dan Madrasah Yang Terakreditasi Tahun 2018 per Provinsi

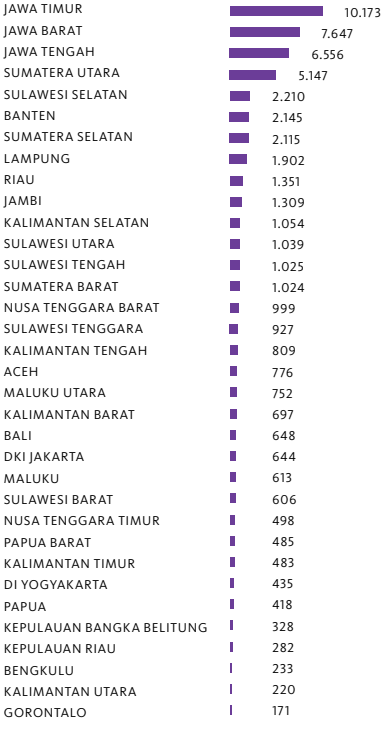

Gambar 2. Persentase Peringkat Akreditasi S/M Yang Diakreditasi Tahun 2018

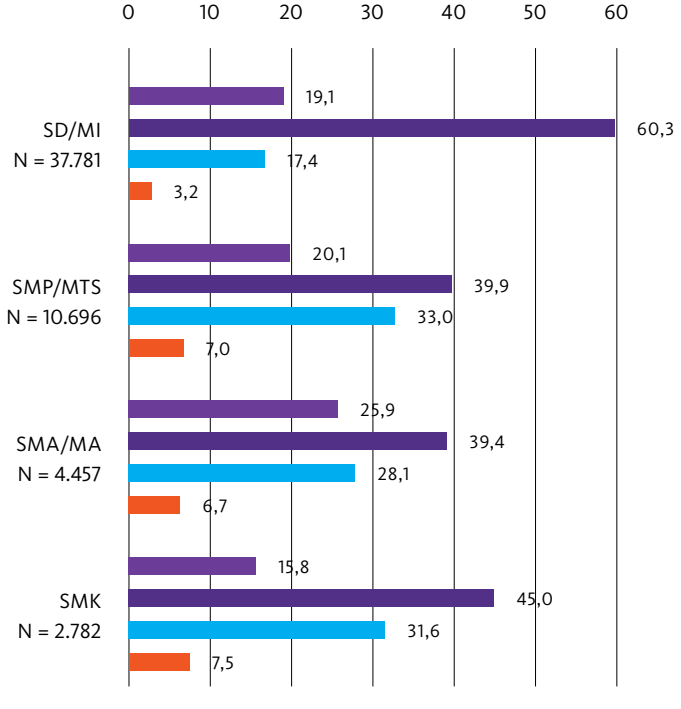

satuan pendidikan sasaran baru dan satuan pendidikan reakreditasi.

Rekomendasi dan Tantangan
Realisasi pelaksanaan akreditasi tahun 2018 telah melampaui target dari yang direncanakan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program, ditemukan beberapa masalah yang menjadi hambatan sehingga berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program BAN-S/M. Masalah yang dihadapi BAN-S/M selama pelaksanaan akreditasi tahun 2018 menjadi tantangan tersendiri yang perlu diidentifikasi sehingga dalam pelaksanaan program akreditasi pada tahun 2019 dapat berjalan lebih baik. Tantangan yang dihadapi BAN-S/M meliputi:

1. Masih banyak satuan pendidikan khususnya untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang tidak mengetahui manfaat akreditasi dan menganggap akreditasi tidak penting. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian satuan pendidikan yang tidak bersedia atau enggan mengisi Data Isian Akreditasi (DIA) sebagai syarat awal untuk dilakukan akreditasi.

2. Akses terhadap SISPENA mengalami kendala di banyak satuan pendidikan di daerah terpencil akibat jaringan internet, sarana dan sumber daya yang terbatas.

3. Perubahan kebijakan saat akreditasi berlangsung berpengaruh terhadap proses akreditasi karena SISPENA yang belum sempurna terutama terkait dengan kapasitas *software* dan *hardware* dalam sistem.

4. Belum dimilikinya data akreditasi yang akurat satuan pendidikan di beberapa provinsi, mengakibatkan adanya perubahan-perubahan data sasaran pada saat proses akreditasi berlangsung.
5. Belum adanya data asesor yang akurat dan masalah kekurangan asesor di beberapa provinsi berakibat penugasan asesor mengalami hambatan.

6. Beberapa BAN-S/M Provinsi tidak melaksanakan tahapan sesuai langkah dalam standar operasional prosedur (POS) yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M.

7. Masih ditemukan asesor yang melanggar kode etik di mana terjadi praktik menyimpang yang dilakukan oleh asesor, misalnya menerima gratifikasi.

8. Sebagian besar asesor tidak memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi yang tepat (bersifat operasional) sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman dan Prosedur Operasional Standar (POS) Akreditasi.

9. Terlambatnya pencairan dana akibat masalah administrasi menyebabkan pelaksanaan akreditasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang direncanakan.

10. Kurang optimalnya kinerja anggota BAN-S/M Provinsi di beberapa provinsi

Berdasarkan analisis hasil akreditasi BAN-S/M dan temuan selama pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M merumuskan poin-poin rekomendasi sebagai berikut:

1. Kemendikbud dan BAN-S/M perlu menyosialisasikan akreditasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara kontinyu sehingga masyarakat dan pihak-pihak terkait mengetahui manfaat akreditasi sebagai bagian penting dalam proses penjaminan mutu pendidikan.

2. BAN-S/M perlu mendorong pemangku kepentingan agar dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil akreditasi, sehingga pemanfaatan hasil akreditasi dan rekomendasi yang dihasilkan BAN-S/M memberikan dampak yang optimal.

3. Perlu dipertimbangkan agar ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang perlunya memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi baik, dan pemberian sanksi (*punishment*) kepada yang menolak untuk diakreditasi. Sedangkan satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi C atau TT, perlu ada program pembinaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

4. Perlu sinkronisasi sistem penilaian dan evaluasi terhadap kinerja/kelayakan satuan pendidikan terhadap pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, seperti yang dilakukan oleh BAN-S/M dan LPMP.

5. Perlu penguatan infrastruktur di BAN-S/M untuk penguatan implementasi SISPENA secara optimal, baik *hardware, software* maupun penguatan Sumber Daya Manusia yang ada.

6. Perlu penguatan kapasitas dan kelembagaan BAN-S/M Provinsi terkait dengan bergabungnya sekretariat BAN-S/M Provinsi di LPMP

7. Perlu penyempurnaan perangkat akreditasi yang lebih menekankan pada penilaian kinerja satuan pendidikan (*performance*) daripada pemenuhan dokumen administrasi (*compliance*).

8. Perlu penguatan kapasitas asesor khususnya dalam penyusunan rekomendasi yang lebih operasional sehingga dapat menjadi acuan dalam intervensi kebijakan oleh pihak-pihak terkait.

9. Untuk pelaksanaan akreditasi di provinsi/daerah terpencil, perlu dipikirkan mekanisme pendanaan akreditasi melalui penugasan asesor lintas provinsi.

Menyiapkan Keahlian Inovatif yang Inklusif pada Era Digital

APEC Workshop on Innovative Skills for An Inclusive Future of Works in the Digital Age, Hanoi, 18-19 Juli 2019

Nur Berlian Venus Ali dan Ferdi Widiputera

Sumber Foto:
Nur Berlian Venus Ali dan Ferdi Widiputera

Dinamika tantangan ekonomi dunia berdampak pada tuntutan terhadap iklim pasar kerja yang semakin kompetitif. Hal tersebut oleh beberapa negara direspon positif melalui upaya memperkuat keterampilan calon pekerja, utamanya dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Hal tersebut diyakini efektif dalam membantu para calon pekerja agar berhasil memasuki pasar tenaga kerja yang kompetitif. Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam APEC dalam meningkatkan keterampilan melalui pelatihan berkelanjutan terutama keterampilan digital bagi angkatan kerja guna menghadapi ketidakpastian akan kebutuhan keterampilan di masa depan. Demikian salah satu pembahasan dalam *"APEC Workshop on Innovative Skills for Inclusive Future of Work in The Digital Age"* di Hanoi, Vietnam.

Acara yang berlangsung sejak 18 sampai dengan 19 Juli 2019 tersebut diawali oleh sambutan dari Nguyen Manh Cuong, selaku Direktur Jenderal Hubungan Internasional, Kementerian Tenaga Kerja Vietnam, dan Tan Sri Dr Rebecca Sta Maria selaku Direktur Eksekutif Sekretariat APEC. Kegiatan ini diikuti oleh delegasi dari 10 (sepuluh) negara, yaitu: Chili, Jepang, Malaysia, Rusia, Vietnam, Singapura, Thailand, Filipina, Hongkong, dan Indonesia, serta perwakilan lembaga Internasional seperti World Bank, OECD, UNESCO, UNESCAP, dan ASEAN, serta perwakilan perusahaan swasta di Vietnam, dan Singapura. Acara ini bertujuan untuk menambah pengetahuan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, sekaligus memperluas jaringan dengan menggali berbagai informasi terkait inovasi di era digital. Berbagai praktik baik inovasi pengembangan keterampilan dari berbagai negara juga ditampilkan, untuk kemudian dirumuskan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan di masing-masing negara.

Kegiatan ini menghadirkan Bui Thanh Son, Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam sebagai pembicara kunci. Dalam paparannya, Son menyampaikan tentang momentum penting menandai peringatan 30 tahun APEC, yakni mengevaluasi kemajuan dan melakukan pemetaan arah kebijakan APEC ke depan, terutama di bidang pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di era digital, pengembangan sumber daya manusia, inklusi ekonomi, keuangan dan sosial, dll. Melihat pada tiga dekade terakhir, APEC telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat sumber daya manusia di kawasan Asia-Pasifik melalui sejumlah inisiatif yang signifikan, terutama

Dinamika tantangan ekonomi dunia berdampak pada tuntutan terhadap iklim pasar kerja yang semakin kompetitif. Hal tersebut oleh beberapa negara direspon positif melalui upaya memperkuat keterampilan calon pekerja, utamanya dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi.

Strategi Pendidikan APEC, kerangka kerja APEC tentang pengembangan sumber daya manusia di era digital. Son menyampaikan sudah saatnya bagi APEC untuk menciptakan momentum baru bagi Asia-Pasifik untuk menjadi lokomotif global teknologi baru. Di sesi berikutnya, para *expert* terpilih dari berbagai bidang berkaitan dengan pendidikan dan ketenagakerjaan, diantaranya adalah Joanna Wood, (Konselor Pendidikan pada Kedutaan Australia di Vietnam), Pavel Sorokin, (Institusi Pendidikan dari Rusia), , Philip O'Keefe, (*Practice Manager EAP, Social Protection and Jobs Global Practice* Bank Dunia), Fabio Manca, (*Head of Skills Analysis Team OECD*), dan, Marcus Bartley Johns, (*Asia Regional Director, Government Affairs and Public Policy*, Microsoft), menyampaikan tentang model kemitraan publik-swasta, yang dapat mendorong hubungan ke arah yang lebih kuat antara jaringan pendidikan untuk mendukung sistem keterampilan dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Presentasi dari para *expert* yang dielaborasi melalui diskusi interaktif antar delegasi dari berbagai negara berkenaan dengan kemampuan pengembangan kapasitas ekonomi anggota APEC, seperti: teknologi digital, penguatan kemampuan beradaptasi, manajemen risiko, dan upaya menjembatani kesenjangan digital yang terjadi. Peningkatan kerja sama dalam pengembangan kapasitas, agar dapat membantu para negara anggota untuk dapat berkembang secara efektif, salah satunya melalui upaya mendorong pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.

Pada kesempatan ini, topik kecerdasan buatan juga disampaikan yang berhubungan dengan pembekalan pendidikan di sekolah dalam rangka persiapan memasuki Revolusi Industri 4.0. Upaya perlindungan terhadap kepentingan pekerja di era digital juga menjadi bahasan yang tidak kalah menarik. Hal ini seperti yang disampaikan *Women in Tech*, Lembaga *Non-Government* yang berbasis di Hong Kong terkait pengalaman menginisiasi kebijakan pemerintah yang melindungi kepentingan pekerja di era digital.

Secara kontekstual, konsep pembelajaran sepanjang hayat juga dijadikan landasan filosofi pendidikan di banyak negara, termasuk Indonesia dan Singapura. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Hazelman Norhafis, perwakilan Kementerian Pendidikan Singapura dalam mengembangkan pendidikan di Singapura. Pendidikan berbasis keahlian terapan tertentu, menjadi salah satu fokus pengembangan pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) Balitbang Kamendikbud yang diwakili oleh Nur Berlian Venus Ali memaparkan tentang penguatan pendidikan vokasi khususnya SMK dalam memasuki era digital. Kajian-kajian yang dilakukan Puslitjakdikbud menemukan beberapa strategi pengembangan yang perlu dilakukan, diantaranya transformasi pola pembelajaran tradisional ke metode pembelajaran baru yang berbasis siswa, multimedia, kolaboratif, pertukaran informasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dalam paparannya, Nur Berlian juga menjelaskan tentang besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan kejuruan yang diwujudkan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, termasuk peningkatan peran berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan Badan Standar Nasional Pendidikan. Praktik baik berupa kemitraan industri dan SMK dalam meningkatkan kesiapan SMK memasuki era digital lebih banyak diintensifkan melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, perbaikan infrastruktur, beasiswa, dan *teaching factory*, yang seluruhnya menjadi salah satu perwujudan dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan vokasi di Indonesia. Praktik penguatan kurikulum melalui penyelarasan Kurikulum SMK dengan kebutuhan industri banyak diintensifkan di beberapa SMK di Indonesia, seperti di SMK NU-Banat, Kudus yang telah melakukan inovasi kurikulum khususnya pada Jurusan Tata Busana dengan mengintegrasikan kurikulum dengan inovasi praktik pembelajaran yang berfokus pada desain kreatif siswa sekaligus strategi penjualannya. Hasilnya,

produk pakaian yang dihasilkan SMK NU-Banat, Kudus dapat diterima pasaran khususnya di beberapa *platform* belanja *online* terpopuler. Transformasi pendidikan kejuruan di beberapa SMK terwujud melalui kerjasama dengan sektor swasta sebagai implementasi dari program *corporate social responsibility* (CSR) yang dimiliki. Transformasi ini berbentuk inovasi praktik pembelajaran dan ketersediaan buku dan referensi pengajaran bernuansa industri, menghadirkan pengajar praktisi dalam dan luar negeri, serta penataan ruang kelas yang lebih nyaman dan interaktif layaknya kantor-kantor *startup*. Dukungan pemerintah Indonesia melalui Kemenkeu juga diimplementasikan dalam bentuk pemberian intensif pengurangan pajak 200% melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 untuk sektor swasta yang berkontribusi pada pengembangan SDM termasuk melalui pendidikan kejuruan/vokasi (Tempo, 2019).

Teknologi baru dengan cepat menembus dunia kerja dan mengubah keterampilan yang dibutuhkan untuk masuk dan berkembang di pasar tenaga kerja dan berkembang dalam masyarakat digital. Ini serupa dengan yang disampaikan oleh Fabio Manca, dari OECD *Centre for Skills* tentang *Outlook 2019: Perkembangan Keterampilan Dunia Kerja di Era Digital*, bahwa penggunaan robot otomatis sebagai pengganti pekerja, semakin meningkat jumlahnya. Data Transformasi Digital Era Robot Iindustri yang dilansir oleh *International Federation of Robotics* tahun 2018, menyebutkan bahwa pasokan robot global telah meningkat dari 81 ribu pada 2003 menjadi 294 ribu di tahun 2016. Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 521 ribu pada 2020 mengingat perusahaan manufaktur yang menggunakan sistem robotik, dengan harga sekitar USD 10 – USD 20 per jam (rata-rata) lebih rendah dibanding upah pekerja manufaktur saat ini (rata-rata di atas USD 20).

Nguyen Minh Hang, Deputi APEC yang juga Direktur Jenderal Hubungan Kerjasama Ekonomi, Kemenlu Vietnam dalam penutupannya menyimpukan lima rekomendasi penting dari acara yang berlangsung selama dua hari tersebut, yaitu :

1. Perlu dilakukan pengembangan pendekatan pomprehensif dan kebijakan holistik tentang keterampilan inovatif untuk masa depan yang inklusif

2. Upaya mentransformasi pendidikan dan pelatihan untuk masa depan pekerjaan yang inklusif

3. Mempromosikan agenda yang berpusat pada SDM untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mendukung transisi tenaga kerja

4. Pengembangan kapasitas pengusaha untuk mempercepat akuisisi teknologi, tata kelola reformasi, dan pelatihan karyawan

5. Terakhir, mendorong sinergi di antara organisasi regional dan internasional tentang keterampilan inovatif.

Bui Thanh Son Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, berharap agar acara tersebut dapat menjadi sarana menciptakan berbagai jenis kolaborasi antar negara. Selain itu, akan menjadi masukan penting untuk Pertemuan Pemimpin APEC mendatang di Chili pada November 2019. Diskusi dan rekomendasi pertemuan tersebut juga akan memberikan saran penting dalam mengembangkan Visi APEC Pasca-2020 untuk kawasan Asia-Pasifik yang dinamis, saling terhubung, dan makmur.

Mempersiapkan Guru Abad 21

Pesta Liana Silalahi

Manusia Sebagai Guru Kehidupan

Peradaban memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan khususnya nalar manusia dalam bertindak untuk mengambil keputusan serta bertingkah laku yang baik secara norma yang berlaku di masyarakat, berbudaya dalam menciptakan suatu karya, sehingga terciptanya harmoni kehidupan yang selaras serta bermanfaat bagi kemajuan peradaban manusia.

Perkembangan pengetahuan serta teknologi membuktikan adanya dampak kemajuan peradaban di segala bidang khususnya pendidikan. Pengalaman, perjalanan waktu, lingkungan, hubungan dengan manusia lainnya dan solusnyai bisa menjadi guru dalam kehidupan nyata, yang sering kali mengacu kepada penyelesaian menang atau kalah, terbaik atau menjadi pecundang dalam hidup. Dengan demikian mereka tertempa/terbentuknya karakter yang kuat dalam menghadapi masalah serta tantangan dalam kehidupan serta menambah kecerdasan dan kedewasaan diri.

Guru dan Istilahnya

Istilah guru selalu dikaitkan dengan suri tauladan, kadang disanjung, dielukan bahkan dicemooh. Sikap dan gayanya pun seringkali mempengaruhi pandangan masyarakat apakah seorang guru yang baik atau tidak. Saat guru mengajar dengan mudah dimengerti, dekat dan peduli terhadap lingkungan khususnya terhadap anak didiknya guru tersebut akan disukai dan diberikan pujian. Saat guru bersikap tegas, disiplin dan menegur, cenderung menyeramkan bahkan membuat anak

Guru yang telah mempersiapkan diri dalam menghadapi era industri 4.0 atau guru abad 21, memiliki kemampuan yang sangat global serta berusaha menggali rasa ingin tahu akan pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan.

menjadi takut belajar. Fenomoena ini yang ada di dalam masyarakat, baik maupun tidak pandangan yang timbul guru tetap dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik.

Guru Penggerak

Guru dituntut menjadi penggerak dan memberikan motivasi kepada siswa dalam mengajar dalam mengukur masa depannya. Guru harus mampu memberikan konsep pemikiran serta penalaran secara simpel, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan kelas. Bersaing dengan perkembangan dan kemajuan peradaban zaman dan teknologi, guru harus kreatif dan Inovatif dalam menyajikan materi yang dapat dengan mudah diserap oleh siswa sekarang ini lebih asik dengan telepon genggamnya.

Guru Zaman Now

Guru yang telah mempersiapkan diri dalam menghadapi era industri 4.0 atau guru abad 21, memiliki kemampuan yang sangat global serta berusaha menggali rasa ingin tahu akan pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan.

Pembelajaran abad 21 merupakan hal yang terbaru bagi tiap sekolah yang ada di Indonesia, sehingga untuk menghadapi abad tersebut guru harus diperkenalkan dengan pembelajaran abad 21 dalam menyambut era industri 4.0.

Virtual Coordinator Training Indonesia

Guna membantu memajukan kemampuan guru dalam pembelajaran abad 21, Pustekkom, SEAMEO dan SEAMOLEC, Kemendikbud berusaha membantu para guru melelui kegiatan daring untuk memajukan kemampuan guru yang sebelumnya konvensional (gagap teknologi/gaptek) menjadi millenial (peduli dengan perkembangan teknologi). Kegiatan secara daring dapat memberi arahan melalui jarak jauh, mempersingkat waktu, tempat serta biaya dalam pembelajaran dalam program *Virtual Coordinator Training* Indonesia (VCTI) yang telah dilaksanakan secara bertahap sejak awal Januari 2019.

Kegiatan VCTI ini merupakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan WEBEX sebagai alat komunikasi serta visual dalam kegiatan pembelajaran. Para peserta harus melakukan secara *online* dalam pembuatan flayer sebagai promosi kegiatan yang akan dilaksanakan, serta membuatkan daftar hadir pada peserta yang aktif atau telah mengikuti pembelajaran secara vicon dengan menggunakan WEBEX. Para peserta juga harus mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk video yang direkam dengan menggunakan applikasi yang ada di web, kegiatan tersebut akan dipublikasikan melalui *youtube.*

Para peserta melakukan pendaftaran secara daring untuk dapat mengikuti pelatihan tersebut. Peserta adalah para guru hebat, instansi pemerintah, serta para penggiat dalam bidang IT, yang merasa terpanggil dalam memajukkan kegiatan pendidikan terutama dalam menggunakan teknologi untuk menjawab tantangan industri 4.0.

Dalam pelatihan tersebut peserta dapat melakukan beberapa tugas yang diberikan antara lain, dua kali menjadi presenter, dua kali menjadi host, dua kali menjadi moderator. Setelah melaksanakan tugas tersebut di akhir pelatihan peserta mendapatkan serifikat sebagai peserta *Virtual Coordinator Training.*

Pemukiman dan Keanekaragaman Etnik Pada Peradaban Masa Majapahit

Yusmaini Eriawati

Indonesia memilliki banyak tinggalan budaya dari era pengaruh Hindu-Buddha, satu diantaranya adalah budaya dari Kerajaan Majapahit. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) telah beberapa kali melakukan penelitian di situs-situs arkeologi Kerajaan Majapahit. Penelitian peradaban Hindu-Buddha masa Kerajaan Majapahit yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional diantaranya adalah di Situs Grogol. Lokasi Situs Grogol berada di perbatasan tiga desa yakni Desa Pakis, Temon, dan Dukuhngarjo, Kecamatan Trowulan dan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto memiliki tinggalan budaya Kerajaan Majapahit, kerajaan masa Hindu-Buddha,yang berpengaruh di Nusantara sekitar abad ke-14. Banyak hal yang dapat diungkap dari penelitian Kerajaan Majapahit, antara lain mengenai peradaban. Penelitian arkeologi di Situs Grogol, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Trowulan bertemakan peradaban masa Majapahit. Tujuannya untuk menghimpun data mengenai tinggalan-tinggalan arkeologi yang berkaitan dengan sisa-sisa peradaban pada masa Kerajaan Majapahit, dan mengungkap bentuk ataupun lanskap permukiman dan keanekaragaman etnik pada masa Majapahit di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Lantai berbahan krakal, struktur tembok bata pembagi ruang-ruang, Situs Grogol Kawasan Trowulan. Difoto dengan menggunakan drone.

Sumber: Puslit Arkenas

Data arkeologi yang diperoleh di Situs Grogol terdiri dari keramik, tembikar, uang kepeng Cina, pipisan, lumpang batu, struktur bata, fragmen tulang,

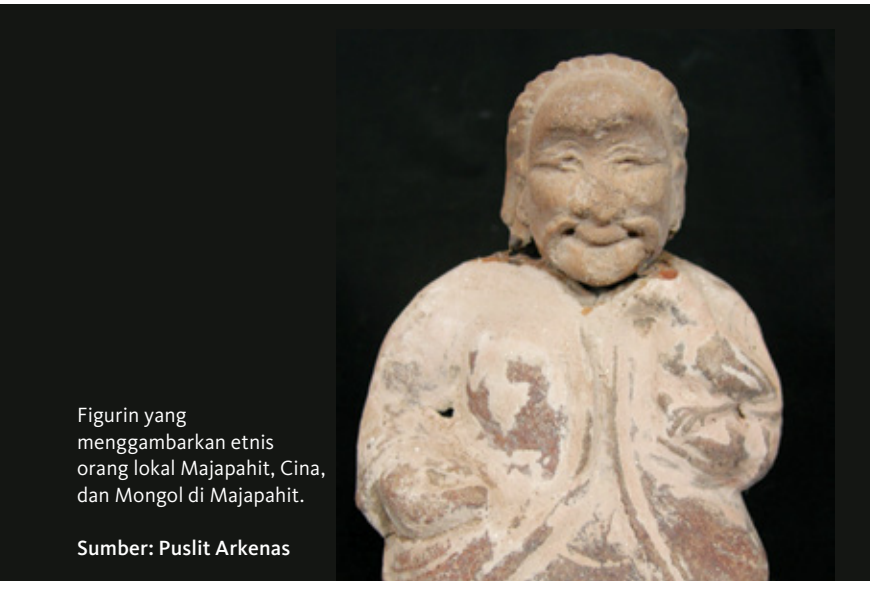

Figurin yang menggambarkan etnis orang lokal Majapahit, Cina, dan Mongol di Majapahit.

Sumber: Puslit Arkenas

gigi hewan jenis *bovidae*, pecahan genteng, penyangga pintu dibuat dari batu andesit (*dropel*), figurin, dan struktur dibuat dari terakota. Struktur ditemukan dengan metode penggalian sistematis (ekskavasi) merupakan sisa tembok orientasi memanjang utara – selatan, yang tersisa panjang sekitar 4 m, tinggi 11 m. Struktur yang ditemukan merupakan sisa tembok pembagian ruang-ruang. Selain struktur sisa tembok juga ditemukan lantai yang disusun dari batu kerikil, kerakal.

Tembikar yang ditemukan terdiri dari berbagai bentuk wadah, antara lain: tempayan, kendi, periuk, pasu, celupak, nampan. Adapun jenis terakota yang ditemukan, antara lain: vas bunga, jambangan, miniatur candi, genteng, relief manusia, ornamen bentuk ukel. Analisis bentuk,asal, dan kronologi keramik yang ditemukan diketahui bahwa keramik terdiri dari bentuk wadah, antara lain mangkuk, piring, cepuk, buli-buli, vas, guci, tempayan, dan botol. Keramik berasal dari Cina Dinasti Song Utara (abad ke 10–12), Dinasti Song Selatan (abad ke 12–13), Dinasti Yuan (abad 13-14), Dinasti Ming awal; keramik Vietnam (abad ke 13–14, 14–15,15), dan keramik dari Thailand (abad ke 13–14, 14–15,15). Keramik Cina dinasti Song Utara (abad ke 11–12) dan Song Selatan (abad ke

12–13), keramik Yuan (abad ke 13–14) merupakan jenis keramik yang banyak ditemukan diantara keramik lainnya. Berpijak pada perolehan tinggalan arkeologi terungkap bahwa permukiman masa Majapahit diantaranya terdapat di Situs Grogol. Pemukiman masa Majapahit di Situs Grogol adalah pemukiman dari masyarakat dengan strata sosial lapisan atas. Pemukiman tersebut ditandai dengan penggunaan komponen bangunan tempat tinggal seperti: atap genteng, mengenal ornamen sebagai ragam hias pada atap, tiang, hiasan dinding rumah tinggal, dan pembagian ruang-ruang. Selain dari struktur keberadaan pemukiman masa Majapahit juga dibuktikan dari penggunaan peralatan rumah tangga sehari-hari berupa piring, mangkuk dari keramik asing (Cina, Vietnam, Thailand), dan peralatan dibuat dari tembikar.

Mengenai keanekaragaman masyarakat masa Majapahit, terungkap bahwa permukiman masa Majapahit merupakan masyarakat yang beranekaragam, majemuk. Permukiman masa majapahit telah dikunjungi, telah dihuni oleh kelompok masyarakat, orang-orang berasal dari berbagai macam etnik. Keanekaragaman etnik tersebut dibuktikan dari temuan-temuan figurin, baik dalam kondisi utuh maupun telah patah. Figurin-figurin tersebut memperlihatkan muka atau wajah berbagai etnik yakni, orang lokal (Majapahit), Bali, Melayu, Cina, Tartar/Mongol, Campa, Persia/ Arab, dan Eropa (Yunani). Figurin-figurin dengan bentuk muka orang dari berbagai etnik yang diperoleh dari ekskavasi pada Situs Grogol tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman etnik yang hidup berdampingan pada masa Majapahit.

Pendidikan Non Formal: Ujung Tombak Pemberantasan Buta Aksara di Daerah 3T

Bakti Utama

Terhitung sejak Indonesia merdeka, salah satu keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang paling nampak adalah menurunnya angka buta aksara. Jika pada tahun 1945 lebih sekitar 90% penduduk Indonesia masih tergolong buta aksara, pada 2016 persentase angka buta aksara menurun pada angka 2% saja. Namun kerja belum selesai, hingga saat ini dari sekitar 164 juta penduduk usia 15-69 tahun, masih terdapat lebih dari 3 juta penduduk yang buta aksara. Sebagian besar dari mereka merupakan penduduk yang tinggal di daerah Terdepan, Terluar, dan tertinggal (3T) dimana layanan pendidikan formal tersedia dalam jumlah terbatas.

Peran Pendidikan Non-Fomal

Selama ini, pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerah 3T menghadapi setidaknya dua tatangan besar. Pertama, sebagian dari masyarakat tersebut tinggal di wilayah yang secara geografis terisolir sehingga tidak terjangkau oleh fasilitas pendidikan. Kedua, strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pendidikan formal seringkali tidak sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat. Kedua tantangan ini membuat masyarakat di daerah 3T tidak terjangkau oleh pelayanan pendidikan secara optimal.

Untuk memperluas akses pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat di daerah 3T, pemerintah telah mendorong berkembangnya jalur pendidikan *non-formal* (PNF). Dalam konteks ini, PNF dipandang memiliki beberapa keunggulan. Pertama, proses pembelajaran dalam PNF relatif fleksibel sehingga dapat mengakomodasi beragam konteks sosio-kultural warga belajar. Kedua, materi pembelajaran dalam PNF lebih bersifat fungsional sehingga lebih berguna dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat/ warga belajar. Ketiga, biaya dalam PNF relatif lebih murah. Kebutuhan dalam pelaksanaan PNF seringkali dapat dipenuhi oleh sumberdaya yang tersedia pada komunitas dimana PNF tersebut dilaksanakan.

Berbagai program pada jalur PNF telah dilakukan Kemendikbud untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Khusus untuk memberantas buta aksara di daerah 3T pemerintah melaksanakan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus (KD-KAT). Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan ini merupakan layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung menggunakan Berbahasa Indonesia. Melalui program ini warga belajar diharapkan dapat mengaktualisasikan potensi diri pada komunitas dimana mereka tinggal.

Program pendidikan KD-KAT telah dimulai sejak 2016. Pada 2016 sejumlah 9 komunitas telah menerima program ini. Pada 2017, sasaran program ini

meningkat menjadi 25 komunitas. Sementara pada 2018, program ini menyasar 21 komunitas. Pada setiap komunitas, program ini melibatkan 100 warga didik. Artinya, dalam tiga tahun tersebut program ini telah menyasar 5.500 warga belajar dari 55 komunitas.

Asesmen program yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Balitbang, Kemendikbud menunjukkan bahwa secara umum target minimal 80% warga belajar mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (Sukma) terpenuhi. Kajian tersebut juga menunjukkan besarnya peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam memfasilitasi warga belajar sehingga tidak hanya tingkat partisipasi dalam program ini begitu tinggi tetapi juga capaian program dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Di beberapa daerah, pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar ini langsung dilanjutkan dengan program keaksaraan lanjutan. Salah satu program keaksaraan lanjutan yang dijalankan oleh Kemendikbud adalah melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Melalui berbagai aktivitas di dalam KUB ini, warga belajar dapat mengimplementasikan kemampuan literasi dasar yang telah diperoleh melalui program keaksaraan dasar sehingga kemampuan baca, tulis, hitung yang mereka miliki tidak hilang lagi.

Kemandirian Lembaga Penyelenggara Program PNF

Meskipun kajian yang dilakukan oleh Puslitjakdibud menunjukkan besarnya peran PKBM dalam pelaksanaan program keaksaraan dasar, namun satu catatan penting untuk diperhatikan. Catatan tersebut terkait dengan rendahnya kemandirian PKBM sebagai lembaga penyelenggara program PNF. Hampir semua PKBM yang menjadi sasaran kajian ini menggantungkan sumber pendaannya pada anggaran dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Artinya, ketika pemerintah tidak memberikan anggaran kepada PKBM, kegiatan PKBM juga berhenti. Di beberapa daerah bahkan terdapat kasus dimana PKBM sengaja didirikan ketika pemerintah mengadakan program PNF di daerah tersebut, dan langsung menghentikan pelayanannya untuk selamanya ketika program tersebut selesai dilaksanakan.

Kondisi semacam ini menjadi ironi, ketika mengingat PKBM yang salah satu programnya melatih kemandirian warga belajar melalui KUB justru menjadi lembaga yang tidak mandiri. Bagaimana bisa PKBM mengajarkan kemandirian kepada warga belajar, sementara dirinya sendiri tidak mandiri?

Dampak dari kurangnya kemandirian PKBM sebagai penyelenggara program PNF adalah rendahnya tingkat keberlanjutan program. Beberapa warga belajar yang telah mendapatkan pelayanan pendidikan melalui program keaksaraan dasar tidak dapat melanjutkan ke program keaksaraan lanjutan maupun program kesetaraan karena PKBM tidak memiliki anggaran untuk mengadakan program tersebut. Akibatnya, kemampuan literasi dasar yang telah dimiliki oleh warga belajar seringkali hilang kembali karena tidak pernah dipraktikkan.

Revitalisasi Lembaga Pendidikan Non-Formal

Ke depan, upaya revitalisasi lembaga pendidikan non-formal penting untuk dilakukan. Salah satu fokus yang penting untuk diperhatikan adalah meningkatkan kemandirian lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan non-formal yang selama ini bergantung pada sumber pendanaan dari pemerintah. Ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung upaya ini. Pertama, memberi kesempatan kepada PKBM atau lembaga lain yang menyediakan pelayanan PNF untuk menjalankan usaha produktif. Selain membuka peluang PKBM untuk mendapatkan sumber pendanaan secara mandiri, kegiatan produktif yang dilakukan juga dapat digunakan sebagai wahana belajar bagi warga belajar di PKBM tersebut. Kedua, mengintegrasikan PKBM dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Saat ini, munculnya skema dana desa memberi amanah kepada desa untuk mengalokasikan sebagaian anggaran dana desa tersebut untuk kepentingan pendidikan. Jika PKBM dapat memanfaatkan dana desa ini, tentu saja hal tersebut lebih memberikan jaminan atas keberlanjutan program yang mereka miliki. Namun demikian, sebuah kajian yang komprehensif perlu untuk dilakukan untuk mendukung upaya revitalisasi PKBM sehingga pelayanan pendidikan terutama di daerah 3T dapat semakin meningkat.

Takdir yang Tidak Ditentukan oleh Sejarah

Irawan Santoso Suryo Basuki

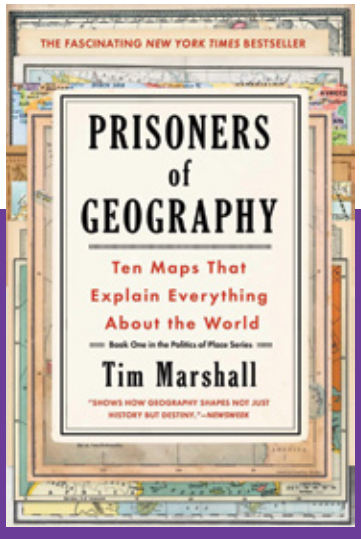

JUDUL BUKU

PRISONERS OF GEOGRAPHY: TEN MAPS THAT TELL YOU EVERYTHING YOU NEED TO KNOW. ABOUT GLOBAL POLITICS

Penulis
Tim Marshall

Penerbit
Elliott & Thompson

Cetakan
Pertama, 2015

Jumlah Halaman
203 (versi epub)

Pada awalnya, kita semua adalah pemula. Kita tidak dapat berlari kencang tanpa lebih dulu belajar berjalan. Begitupun pengetahuan. Semua berangkat dari ketidakpahaman, kemudian kuriositas membimbing kita mengakumulasi informasi. Melalui berbagai teknik dan metode pembuktian, informasi ini disusun rapi. Hasil akhirnya adalah pengetahuan seperti yang kita kenal sekarang.

Jika bukan polimat atau *aficionado* – bakat bawaan yang hampir pasti sulit ditemukan hari-hari ini – seseorang hanya dapat menjadi pakar dalam hal spesifik tertentu, dan menjadi orang awam (*layman*) untuk hal-hal lain. Ketika ingin mengetahui hal di luar kecakapan tertentu yang dikuasai, kita mesti hati-hati menentukan bacaan bagus sebagai pembuka jalan. Alih-alih menuntun menuju pencerahan, bacaan yang tidak tepat dapat membuat kita tersesat.

Bagi pemula dalam kajian geopolitik, *Prisoners of Geography: Ten Maps That Tell You Everything You Need to Know About Global Politics* adalah contoh buku pembuka jalan yang ideal. Namun, Tim Marshall, sebagai penulis, sepertinya tidak ingin bukunya memiliki audiens yang terbatas. Ia ingin juga menjangkau pembaca akademis dengan level pengetahuan tinggi. Hal ini berarti, selain mengajak para pembaca pemulanya belajar berjalan, pada saat bersamaan, Marshall ingin berlari bersama pembaca tingkat lanjutnya. Ia berhasil melakukannya dengan membangun narasi sederhana yang mengalir dengan selipan analisis yang ringkas-padat.

Prisoners of Geography berangkat dari sebuah hipotesis yang mampat: takdir sebuah negara ditentukan oleh posisinya di peta dunia. Geopolitik berpengaruh baik saat perang maupun ketika masa damai (hlm 13). Pemimpin sepintar apapun tidak akan mampu melepaskan diri dari penjara geografis negaranya. Lokasi pun mendeterminasi karakteristik sebuah negara, apakah menjadi ekspansif atau justru terisolasi.

Wilayah yang dicakup dalam bahasan adalah sepuluh contoh kawasan yang membuktikan hipotesis tadi. Meski kerap dikritik oleh para akademia karena kedangkalan pembahasan dengan cakupan yang terlalu umum, Marshall telah cukup ketat melakukan pemilahan area bahasan dengan justifikasi yang solid. Argumen-argumen tentang konstelasi politik wilayahnya masuk akal. Meski jelas, strategi diplomasi internasional satu negara terhadap negara-negara lainnya tidak dapat dikonfirmasi. Semuanya menyangkut rahasia negara. Misalnya, selain motif ekonomi, kita, dan juga Marshall, tidak pernah tahu pasti alasan China membangun jalan dari dan ke wilayah Tibet, kemudian berlanjut dengan pendirian kawasan industri yang mengambil orang-orang Han sebagai pekerjanya. Kita hanya dapat menduga dengan nalar yang bekerja baik. Hal inilah yang dilakukan oleh Marshall. Dengan menggunakan logika, bukan *otak-atik gathuk, Prisoners of Geography* berhasil membedakan dirinya dengan tabloid gosip.

Lintang Geografis Sebagai Penentu

Marshall mengatakan bahwa determinan awal, untuk tidak mengatakan tunggal, yang menentukan sebuah wilayah menjadi negara maju atau tertinggal adalah geografi. Faktor-faktor lainnya, seperti budaya, bahasa, etos kerja, dan sistem politik, adalah subdeterminan dari faktor penyebab pertama tadi. Dengan kata lain, ia seolah ingin melawan adagium yang menyatakan bahwa nasib sebuah bangsa ditentukan oleh sejarah. Sejarahlah yang ditentukan oleh geografi. Subdeterminan-subdeterminan ini, salah duanya menyoroti institusi politik beserta critical juncture yang menentukan arah sejarah, dibahas detail oleh Acemoglu dan Robinson dalam *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty.*

Amerika Serikat dijabarkan sebagai salah satu bukti kuat hipotesis ini. Menurut Marshall, betapa krusialnya keputusan cerdas-akurat (*shrewd*) pemimpin terdahulu negara itu yang memperluas teritorinya dengan berbagai cara, seperti membeli sejumlah daerah yang dinilai tidak potensial dari kolonis yang lain, hingga berakhir menjadi negara federasi yang kuat. Eropa Barat, sebagai contoh yang yang lain, ditunjukkan dengan menekankan bahwa wilayah yang datar dan layak huni beserta sungai-sungai yang dapat dinavigasi membantu orang-orang Eropa membangun budaya yang darinya peradaban modern dimulai. Pendapat ini setali-tiga-uang dengan pendapat Ferguson dalam *Civilization: The West and the Rest*, yang mengatakan secara arogan bahwa budaya Barat menang segalanya atas kultur Timur. Barat, dengan budaya rasionalnya, memenuhi semua prasayarat untuk menguasai dunia. Menurut Ferguson, karakteristik khas dua kutub budaya ini terbentuk dari faktor geografis yang berbeda. Tidak seperti Rusia, China, dan dua region yang disebut di atas, yang dengan jelas dapat dilihat bahwa geografi alamiah adalah penentu awal-tunggal nasib mereka, di sisi lain dunia, banyak faktor "takdir" yang saling berkelindan. Sebut saja negara-negara di benua Afrika. Mereka secara alamiah memang sudah terisolasi. Namun, negara-negara Eropa turut andil dalam memperburuk situasi ini. Penarikan garis maya batas-batas negara di Afrika yang dilakukan serampangan oleh kolonis Eropa memperburuk hubungan mereka dengan dunia luar hingga hari ini.

Sebagai seorang Inggris, Marshall mengakui dengan tulus bahwa kebanyakan orang Afrika sekarang terpenjara oleh apa yang ia istilahkan sebagai faktor geografis-politis (*political geography*) yang dibuat oleh orang-orang Eropa (hlm. 85). Banyak perubahan terjadi setelah gerakan kemerdekaan di Afrika, akan tetapi, secara mengejutkan garis pembatas wilayah yang dibuat "orang luar" itu tidak berubah.

Marshall menuding masalah-masalah yang muncul terkait garis pembatas itu adalah akibat dari pengabaian orang-orang Eropa terhadap faktor budaya, perbedaan bahasa, dan kondisi demografi. Mereka meringkus potensi masalah dengan satu solusi artifisial yang buruk: konsep Eropa tentang negara-bangsa. Konsep yang belum dikenal oleh kelompok-kelompok tribalistik itu mewujud dalam penentuan garis-garis batas cikal bakal negara, yang disebut sebagai usaha menciptakan "telur tanpa ayam" (hlm. 88). Kecerobohan yang sama dilakukan orang-orang Eropa di Timur Tengah dengan menarik garis khayal Sykes-Picot.

Ada beberapa ulasan yang mengatakan bahwa hipotesis Marshall terbantahkan, setidaknya di wilayah Asia Timur. Mereka mengulik lintang 380 di Semenanjung Korea yang memisahkan dua negara. Para pengulas mempertanyakan mengapa, dengan kondisi geografis dan kultur serupa, Korea Utara dan Korea Selatan menjadi dua negara dengan takdir yang berbeda. Pertanyaan ini menjadi dangkal karena mengabaikan fakta bahwa ada subfaktor yang terbentuk karena determinan awal tadi. Semenanjung Korea menjadi wilayah strategis bagi dua negara adikuasa saat Perang Dingin berlangsung. Sebegitu pentingnya semenanjung ini hingga penasihat militer Prusia dalam Perang Sino-Jepang, Klemens Meckel, menganalogikannya sebagai "pedang yang menusuk tepat di jantung Jepang" (hlm. 147). Jepang sendiri adalah sekutu kuat Amerika di Asia. Di semenanjung itu terjadi perang "ideologi" yang, meminjam telaahan Acemoglu dan Robinson, berujung dengan lahirnya institusi politik dan ekonomi ekstraktif yang memiskinkan di Utara dan institusi politik dan ekonomi inklusif yang menyejahterakan di Selatan.

Mencakup Semua

Bagi Marshall, semua kembali ke persoalan geografi. Faktor ini yang menentukan takdir sebuah negara. Kemajuan teknologi belum sepenuhnya meniadakan penghalang alamiah itu. Ia menekankan bahwa lanskap fisik tetap menjadi penghambat perkembangan teknologi. Jika dulu orang-orang Eropa, dan kemudian Amerika, berkeliling dunia berkat kemajuan teknologi yang mereka capai, ada orang-orang di luar mereka yang pada saat bersamaan menganggap kertas, roda, lampu, dan mesiu sebagai keajaiban berbau mistis.

Rasanya, *Prisoners of Geography* adalah buku yang menggelitik pembacanya, tidak hanya untuk pemula, namun pembaca akademis yang kritis, untuk berpikir. Bagi kelompok pertama, buku ini adalah pembuka mata yang lengkap dan bagi yang kedua, ia berfungsi sebagai jendela penelusuran bacaan lain yang lebih spesifik dan detail.

Buku ini tidak dimaksudkan sebagai penuntas. Ada banyak pertanyaan yang menggantung. Akan tetapi, dengan segala kekurangannya, *Prisoners of Geography* sukses menjadi pemantik rasa penasaran yang "nakal". Ia layak dirayakan, dinikmati, dan dipedebatkan oleh siapa saja.

Kasmaran Berilmu Pengetahuan

Rochana

Penulis
Iwan Pranoto

Penerbit
Penerbit Buku Kompas

Cetakan
2019

Buku ini disusun berdasarkan pandangan, pemikiran, dan keresahan atas kondisi bangsa saat ini dari seorang guru besar matematika. Melalui petualangan intelektual yang eksploratif pembaca diajak menelisik kekurangan bahkan mungkin kebijakan-kebijakan pendidikan yang kurang tepat bahkan nirmanfaat bagi tumbuhnya iklim bernalar. Kurikulum, Ujian Nasional, Pendidikan Karakter, dan Wajib Belajar adalah beberapa kebijakan yang harus dibenahi/ isu yang disorot dalam buku ini. Kurikulum matematika yang digunakan sekarang tidak melahirkan insan yang bebas bernalar sesuai dengan kaidah keilmuan. Bagaimana mungkin melahirkan insan bebas bernalar jika dalam Kompetensi Dasar (KD) Matematika pada Kurikulum 2013 mengulang-ngulang kata patuh. Padahal, dalam matematika, kepatuhan bukanlah sikap yang dimuliakan. Kepatuhan yang ditanamkan kurikulum melahirkan insan yang tidak melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang ada di sekitarnya, yang jika diimplementasikan pada kehidupan berbangsa akan melahirkan budaya anti nalar yang menafikan kebhinekaan pemikiran, budaya, keyakinan, dan suku. Kurikulum tidak melahirkan insan yang penasaran, kasmaran, dan berhasrat untuk berwisata dalam ilmu pengetahuan dan memaknainya dalam kehidupan.

Dasar penalaran Ujian Nasional (UN) menurut penulis ringkih dan semrawut dari segi pelaksanaan. Namun perguruan tinggi menutup mata bahkan ada yang menerima mahasiswa berdasarkan UN. Birokrat pendidikan selalu berkelit dengan mengatakan bahwa UN adalah multitester bak pisau tentara Swiss yang bisa menyediakan apa saja yang dibutuhkan (hal.150). Padahal, sebagai alat pemetaanpun UN belum terbukti sahih dan andal.

Pendidikan Karakter adalah kebijakan yang melahirkan sain yang berwujud aneh dan keliru dengan menyisipkan perbendaharaan kata-kata moral pada pengetahuan ilmiah. Penyusun Kurikulum 2013 secara gamblang mengompromikan moral dan ilmu pengetahuan tanpa rasa segan secuilpun; disiplin ilmu dibengkokan dan dicocok-cocokan (hal.68). Wajib belajar adalah gagasan yang kontradiktif sekaligus sangat tidak operasional (hal. 114). Apakah bisa menilai anak yang sedang berada di sawah dia tidak sedang belajar? Apakah kita dapat memastikan seseorang yang berada di sekolah selalu belajar? Berbagai program pendidikan berskala nasional seperti UN, UKG, dan lain-lain memiliki "daya serap tinggi" dan juga "menjalankan" Amanat UU, namun dampak terhadap peningkatan kecakapan bermatematika pelajar tidak berarti (hal. 92).

Walaupun sarat dengan kritikan tajam bagi pendidikan, penulis juga menawarkan solusi yang membuka cakrawala baru arah pendidikan. Buku ini adalah jawaban atas pertanyaan atau keheranan terhadap keluaran/hasil pendidikan kita dan wajib dibaca bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan pemerhati pendidikan dengan "lapang dada" sehingga mampu membuka pintu dialog berbasis nalar.

Karena buku ini merupakan kumpulan esai popular penulis pada Harian Kompas dari tahun 2013 -2018, setelah membaca buku ini pembaca hendaknya membandingkan relevansi tulisan-tulisan tersebut dengan kebijakan pendidikan saat ini. Apakah ada perubahan solutif yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Balitbang dalam membangun budaya bernalar? Karena menurut penulis sulit meyakini adanya upaya serius dan sistematis dari Kemendikbud dalam menindaklanjuti hasil studi PISA guna meningkatan pencapaian kecakapan bernalar tingkat rendah dan tinggi (hal. 118).

ALCoB Internet Volunteer (AIV) Workshop 2019

Sumber Foto: Sekretariat Balitbang

Balitbang Kemendikbud, sebagai koordinator *APEC Human Resources Working Group (HRDWG)* Indonesia, dengan Kementerian Pendidikan Korea Selatan dan *Institute of APEC Collaborative Education* (IACE) menyelenggarakan ALCoB Internet Volunteer Workshop pada tanggal 6-8 Agustus 2019. Acara tersebut dihadiri oleh 20 orang guru/ kepala sekolah yang kompeten dari berbagai jenjang pendidikan.

Mentor

Ice breaking pada hari pertama pelaksanaan Kegiatan AIV

Pengoperasian robot yang sebagai sarana belajar murid di Korea

Foto bersama setelah simulasi

Peserta AIV sedang merakit mobil robot pada hari kedua pelaksanaan Kegiatan AIV 2019

Seminar On PISA: Assessing 21st Century Life Skills

Sumber Foto: Sekretariat Balitbang

Balitbang Kemendikbud menyelenggarakan seminar mengenai PISA dan upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Acara tersebut diselenggarakan pada 8 Juli 2019 dengan menghadirkan Direktur OECD, Prof Iwan Pranoto (Guru Besar ITB), dan Prof Nizam (Dekan Fakultas Teknik UGM) di Kantor Kemendikbud, Jakarta.

Andreas Schleicher , Direktur Pendidikan dan Keterampilan, *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*

Mendikbud Kabinet Kerja, Kepala Balitbang, Direktur OECD, Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat, dan Staf Ahli Mendikbud

Prof. Iwan Pranoto, Guru Besar, Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Kerja, Muhadjir Effendy saat membuka acara *Seminar on PISA: Assessing 21st Century Life Skills*

Salah satu peserta Dalam Seminar *On PISA* saat sesi diskusi

Edisi 2, Desember 2019

WARTA**BALITBANG**

FAKTUAL, RESPONSIF, FUTURISTIK

9 771979 355002